



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
NOMOR 814/SJ/KP.03.01/06/2021
TENTANG
SELEKSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 985 Tahun 2021 Tanggal 16 Juni 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2021, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk bergabung menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian Kominfo dengan **Kualifikasi Pendidikan dan Jabatan** yang terdapat pada pengumuman ini.

I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI FORMASI

1. Sekretariat Jenderal
2. Inspektorat Jenderal
3. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
5. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
6. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
7. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
8. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
9. Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)

II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI

A. KEBUTUHAN CPNS PENEMPATAN KEMENTERIAN KOMINFO

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
			396	46	9	6	457	
1	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN	1				1	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
2	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	D-IV KEARSIPAN	1				1	SEKRETARIAT DEWAN PERS
3	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	1				1	BIRO UMUM
4	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI	1				1	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA
5	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI	3	1			4	PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA
6	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER	1				1	SEKRETARIAT DEWAN PERS
7	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA	1				1	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA
8	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / D-IV KEARSIPAN	1				1	SEKRETARIAT DEWAN PERS
9	ANALIS ADVOKASI HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	1				1	BIRO HUKUM
10	ANALIS APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER	1				1	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA
11	ANALIS ASET NEGARA	S-1 AKUNTANSI	2				2	BIRO KEUANGAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
12	ANALIS BARANG MILIK NEGARA	S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN	1				1	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA
13	ANALIS DATA DAN INFORMASI	S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA / S-1 ILMU KOMPUTER	2	1			3	PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA
14	ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT	S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU HUKUM / S-1 MANAJEMEN	1			1	2	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA
15	ANALIS KERJA SAMA	S-1 TEKNIK ELEKTRO TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI	1				1	PUSAT KELEMBAGAAN INTERNASIONAL
16	ANALIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	S-1 AKUNTANSI	2	1			3	BIRO KEUANGAN
17	ANALIS PELAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	2				2	PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA
18	ANALIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	S-1 AKUNTANSI	1	1			2	BIRO KEUANGAN
19	ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR	S-1 PSIKOLOGI	1				1	BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
20	ANALIS PENINDAKAN	S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1		1		2	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA
21	ANALIS PERBENDAHARAAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	1			1	2	BIRO KEUANGAN
22	ANALIS PERENCANAAN	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1				1	BIRO PERENCANAAN
23	ANALIS PERENCANAAN	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 AKUNTANSI	1				1	BIRO PERENCANAAN
24	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN	S-1 MANAJEMEN KEUANGAN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	6			1	7	BIRO PERENCANAAN
25	ANALIS PERMASALAHAN HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	2				2	BIRO HUKUM
26	ANALIS PRODUK HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	2				2	BIRO HUKUM
27	ANALIS SISTEM INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	4		1	1	6	PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
28	PENATA KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI	1				1	SEKRETARIAT DEWAN PERS
29	PENATA LAPORAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI	1				1	BIRO KEUANGAN
30	PENATA LAPORAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 PERPAJAKAN / D-IV PERPAJAKAN	1				1	SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT
31	PENGELOLA AKUNTANSI	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III TEKNIK INFORMATIKA	2				2	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA
32	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III PEMERINTAHAN / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA	1				1	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA
33	PENGELOLA SURAT	D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1				1	BIRO KEUANGAN
34	PENGENDALI JARINGAN KOMUNIKASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	1			3	PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA
35	PENGENDALI TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	1			3	PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA
36	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1				1	BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
37	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	1				1	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA
38	PRANATA BARANG DAN JASA	D-III AKUNTANSI	1				1	BIRO UMUM

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
39	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 PSIKOLOGI	0	1			1	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
40	ANALIS ASET NEGARA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI	1				1	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
41	ANALIS PERBENDAHARAAN	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 AKUNTANSI	1				1	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
42	ANALIS PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1				1	INSPEKTUR II
43	ANALIS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU HUKUM	2	1	1		4	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
44	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR	D-III MANAJEMEN ASET	2				2	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
45	PENGELOLA BAHAN EVALUASI INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI PITALEBAR	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK ELEKTRO	1				1	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PITALEBAR
46	PENGELOLA BAHAN EVALUASI INFRASTRUKTUR KEPERLUAN KHUSUS PITALEBAR	S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO	1				1	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PITALEBAR
47	PENGELOLA BAHAN EVALUASI INFRASTRUKTUR PENYIARAN PITALEBAR	S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO	1				1	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PITALEBAR
48	PENGELOLA BAHAN EVALUASI PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI	S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	1			2	DIREKTORAT PENGENDALIAN POS DAN INFORMATIKA
49	PENGELOLA BAHAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENYIARAN	S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 ILMU HUKUM	1				1	DIREKTORAT PENGENDALIAN POS DAN INFORMATIKA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
50	PENGELOLA BAHAN EVALUASI PENYELENGGARAAN POS	S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK ELEKTRO / D-IV TEKNIK ELEKTRO / S-1 ILMU HUKUM	2				2	DIREKTORAT PENGENDALIAN POS DAN INFORMATIKA
51	PENGELOLA BAHAN EVALUASI PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS DAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU HUKUM / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI	1	1			2	DIREKTORAT PENGENDALIAN POS DAN INFORMATIKA
52	PENGELOLA BAHAN EVALUASI TATA KELOLA PITALEBAR	S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO	1				1	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PITALEBAR
53	PENGELOLA BAHAN KEBIJAKAN IKLIM USAHA PENYIARAN	S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1				1	DIREKTORAT PENYIARAN
54	PENGELOLA BAHAN KEBIJAKAN KELAYAKAN TEKNOLOGI PENYIARAN	S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI	1	1			2	DIREKTORAT PENYIARAN
55	PENGELOLA BAHAN KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PENYELENGGARAAN POS DAN INFOMATIKA	S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI	1	1			2	DIREKTORAT PENGENDALIAN POS DAN INFORMATIKA
56	PENGELOLA BAHAN KEBIJAKAN PENTARIFAN POS KOMERSIAL	S-1 AKUNTANSI	1				1	DIREKTORAT POS
57	PENGELOLA BAHAN MONITORING PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI	S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU HUKUM	2				2	DIREKTORAT PENGENDALIAN POS DAN INFORMATIKA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
58	PENGELOLA BAHAN MONITORING PENYELENGGARAAN PENYIARAN	S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 ILMU HUKUM	1				1	DIREKTORAT PENGENDALIAN POS DAN INFORMATIKA
59	PENGELOLA BAHAN MONITORING PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS DAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI	S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	2				2	DIREKTORAT PENGENDALIAN POS DAN INFORMATIKA
60	PENGELOLA BAHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN PENCEGAHAN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA	S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI	1				1	DIREKTORAT PENGENDALIAN POS DAN INFORMATIKA
61	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEPERLUAN KHUSUS PITALEBAR	S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO	1				1	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PITALEBAR
62	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI PITALEBAR	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK ELEKTRO	1				1	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PITALEBAR
63	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN TATA KELOLA PITALEBAR	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI	1				1	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PITALEBAR
64	PENGELOLA BAHAN TATA KELOLA BIDANG PENGEMBANGAN PITALEBAR	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	1			2	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PITALEBAR
65	PENGELOLA BAHAN TATA KELOLA BIDANG PENGENDALIAN POS DAN INFORMATIKA	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / D-IV AKUNTANSI / S-1 ILMU HUKUM	1		1		2	DIREKTORAT PENGENDALIAN POS DAN INFORMATIKA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
66	PENGELOLA BAHAN TATA KELOLA BIDANG PENYIARAN	S-1 MANAJEMEN	1				1	DIREKTORAT PENYIARAN
67	PENGELOLA BAHAN TATA KELOLA BIDANG POS	S-1 AKUNTANSI	1				1	DIREKTORAT POS
68	PENGELOLA DATA DAN INFORMASI FILATELI	S-1 ILMU KOMUNIKASI	1				1	DIREKTORAT POS
69	PENGELOLA DATA DAN INFORMASI IKLIM USAHA INDUSTRI TELEKOMUNIKASI	S-1 AKUNTANSI / D-IV STATISTIK / D-IV AKUNTANSI / S-1 STATISTIK	1				1	DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI
70	PENGELOLA DATA DAN INFORMASI PENOMORAN TELEKOMUNIKASI	S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK ELEKTRO	1				1	DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI
71	PENGELOLA DATA DAN INFORMASI PERIZINAN POS	D-III EKONOMI/ D-III TEKNIK INFORMATIKA/ D-III TEKNIK KOMPUTER	1				1	DIREKTORAT POS
72	PENGELOLA DATA DAN INFORMASI PRANGKO	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	1				1	DIREKTORAT POS
73	PENGELOLA DATA DAN SISTEM MANAJEMEN PERIZINAN PENYIARAN	S-1 AKUNTANSI	1	1			2	DIREKTORAT PENYIARAN
74	PENGELOLA DATA VERIFIKASI DAN EVALUASI UJI COBA SIARAN TELEVISI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2				2	DIREKTORAT PENYIARAN
75	PENGELOLA KERJASAMA INDUSTRI POS	S-1 SASTRA INGGRIS	2				2	DIREKTORAT POS
76	PENGELOLA PENGEMBANGAN MODEL INDUSTRI POS DAN LOGISTIK	S-1 ILMU EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1				1	DIREKTORAT POS
77	PENGELOLA PERENCANAAN EKOSISTEM PITALEBAR	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI	1				1	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PITALEBAR
78	PENGELOLA PERIZINAN KELAYAKAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI	1				1	DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
79	PENGELOLA PERIZINAN LAYANAN JARINGAN	S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI	1				1	DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI
80	PENGELOLA PERIZINAN LAYANAN JASA	S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK ELEKTRO	1				1	DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI
81	PENGELOLA PERIZINAN LAYANAN POS KOMERSIAL	S-1 ILMU HUKUM	1				1	DIREKTORAT POS
82	PENGELOLA PERIZINAN PENATAAN PENYELENGGARAAN JASA	S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI	1				1	DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI
83	PENGELOLA PERIZINAN PENATAAN PENYELENGGARAN JARINGAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU HUKUM / S-1 AKUNTANSI	1				1	DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI
84	PENGELOLA PERIZINAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA (LPS) DAN LEMBAGA PENYIARAN ASING (LPA) RADIO	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1				1	DIREKTORAT PENYIARAN
85	PENGELOLA PERIZINAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA (LPS) DAN LEMBAGA PENYIARAN ASING (LPA) TELEVISI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2				2	DIREKTORAT PENYIARAN
86	PENGELOLA PERIZINAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS	S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK ELEKTRO	1				1	DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI
87	PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENYIARAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1				1	DIREKTORAT PENYIARAN
88	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN	1				1	DIREKTORAT TATA KELOLA DAN KEMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK
89	AHLI PERTAMA – ARSIPARIS	D-IV KEARSIPAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	1				1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
90	AHLI PERTAMA - PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	S-1 ILMU HUKUM	1				1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
91	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI	0	1			1	DIREKTORAT PENGELOLAAN MEDIA
92	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI	2				2	DIREKTORAT TATA KELOLA DAN KEMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK
93	ANALIS DATA DAN INFORMASI	S-1 ILMU EKONOMI / S-1 STATISTIK / S-1 MANAJEMEN	1				1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
94	ANALIS INFORMASI	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV ANIMASI	3				3	DIREKTORAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
95	ANALIS INFORMASI	S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	1			3	DIREKTORAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEREKONOMIAN DAN MARITIM
96	ANALIS INFORMASI	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1				1	DIREKTORAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEREKONOMIAN DAN MARITIM
97	ANALIS INFORMASI	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-IV ANIMASI	1		1		2	DIREKTORAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
98	ANALIS INFORMASI	S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	1			2	DIREKTORAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
99	ANALIS INFORMASI	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1				1	DIREKTORAT TATA KELOLA DAN KEMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK
100	ANALIS KEMITRAAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	1			2	DIREKTORAT TATA KELOLA DAN KEMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK
101	ANALIS KERJA SAMA	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1				1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
102	ANALIS KINERJA	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	2				2	DIREKTORAT TATA KELOLA DAN KEMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK
103	ANALIS KINERJA	S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1				1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
104	ANALIS KOLEKSI MUSEUM	S-1 ANTROPOLOGI BUDAYA	1	1			2	MUSEUM PENERANGAN
105	ANALIS ORGANISASI	S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1				1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
106	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	S-1 MANAJEMEN	1				1	DIREKTORAT TATA KELOLA DAN KEMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK
107	ANALIS PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	2				2	MUSEUM PENERANGAN
108	ANALIS PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	S-1 ILMU EKONOMI / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1				1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
109	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN	S-1 ILMU EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	1				1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
110	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1				1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
111	KURATOR KOLEKSI MUSEUM	S-1 ARKEOLOGI / S-1 ANTROPOLOGI BUDAYA / S-1 ILMU SEJARAH / S-1 JURNALISTIK	1				1	MONUMEN PERS NASIONAL
112	PEMERIKSA LAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI	1				1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
113	PENGELOLA KEUANGAN	D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI	1				1	MONUMEN PERS NASIONAL
114	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU KOMUNIKASI	2				2	DIREKTORAT TATA KELOLA DAN KEMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK
115	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI	1				1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
116	PENYUSUN NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA	S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU KOMUNIKASI	2				2	DIREKTORAT TATA KELOLA DAN KEMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK
117	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI	1				1	DIREKTORAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
118	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU EKONOMI	1				1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
119	PENYUSUN RENCANA KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA	S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1				1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
120	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN	1				1	SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
121	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 AKUNTANSI / D-IV MANAJEMEN ASET	1				1	BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
122	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU EKONOMI	1				1	BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YOGYAKARTA
123	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / D-IV TEKNIK INFORMATIKA	1				1	BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YOGYAKARTA
124	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / D-IV TEKNIK INFORMATIKA	1				1	BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANJARMASIN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
125	AHLI PERTAMA - WIDYAISWARA	S-2 ILMU KOMPUTER / S-2 TEKNIK INFORMATIKA / S-2 TEKNOLOGI INFORMASI	4				4	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
126	ANALIS BARANG MILIK NEGARA	S-1 AKUNTANSI / D-IV MANAJEMEN ASET	1				1	SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
127	ANALIS FASILITASI PENINGKATAN KOMPETENSI	S-1 MANAJEMEN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1				1	PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN SERTIFIKASI
128	ANALIS MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	1	1			2	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
129	ANALIS MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN	S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI	1				1	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA DAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
130	ANALIS MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN	S-1 MANAJEMEN	1				1	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERANGKAT DAN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
131	ANALIS ORGANISASI	S-1 ILMU HUKUM	1				1	SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
132	ANALIS PENGEMBANGAN JASA SERTIFIKASI	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 EKONOMI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA/ S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1				1	PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN SERTIFIKASI
133	ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR	S-1 PSIKOLOGI / S-1 EKONOMI MANAJEMEN	1				1	SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
134	ANALIS PENJAMIN MUTU	S-1 MANAJEMEN / D-IV MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	2				2	BALAI BESAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDAN
135	ANALIS PENJAMIN MUTU	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2				2	BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JAKARTA
136	ANALIS PENJAMIN MUTU	S-1 MANAJEMEN	1				1	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA DAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
137	ANALIS PENJAMIN MUTU	S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK ELEKTRO	1				1	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERANGKAT DAN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
138	ANALIS PERENCANAAN DAN KERJASAMA	S-1 ILMU EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1				1	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA DAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
139	ANALIS PROGRAM DIKLAT	S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN	1	1			2	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
140	ANALIS TATA LAKSANA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1				1	SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
141	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 ANIMASI DIGITAL	5				5	SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
142	FASILITATOR KEMITRAAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI	1				1	BALAI BESAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDAN
143	FASILITATOR KEMITRAAN	S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2				2	BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANJARMASIN
144	FASILITATOR KEMITRAAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA	1				1	BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JAKARTA
145	PENATA KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	1				1	BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
146	PENATA KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI	2				2	BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMINFO MANADO
147	PENATA LAPORAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI	1				1	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
148	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN PERUSAHAAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1				1	SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
149	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN PERUSAHAAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1				1	SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
150	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	D-III MANAJEMEN PERUSAHAAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER	1				1	SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
151	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 STATISTIKA	3		1		4	BALAI BESAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDAN
152	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 STATISTIKA	1				1	BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JAKARTA
153	PENYUSUN KERJASAMA PELATIHAN	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN	1				1	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
154	PENYUSUN KURIKULUM MODUL DAN BAHAN AJAR	S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN	2	1			3	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
155	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	1	1		3	SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
156	PENYUSUN PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN	S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN	1				1	SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
157	PENYUSUN PROGRAM PENYELENGGARAAN DIKLAT	S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN	1				1	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
158	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU EKONOMI	1				1	SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
159	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN	S-1 EKONOMI MANAJEMEN	1	1			2	SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
160	PETUGAS STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	S-1 MANAJEMEN	1				1	BALAI BESAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
161	PETUGAS STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER	2				2	BALAI BESAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR
162	PETUGAS STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV TEKNIK INFORMATIKA	1				1	BALAI BESAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDAN
163	PETUGAS STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN	1	1			2	BALAI BESAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDAN
164	PETUGAS STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	S-1 ILMU HUKUM / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2				2	BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANJARMASIN
165	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI	2				2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
166	ANALIS DATA DAN INFORMASI	S-1 MANAJEMEN / S-1 STATISTIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	5				5	DIREKTORAT EKONOMI DIGITAL
167	ANALIS DATA DAN INFORMASI	S-1 MANAJEMEN / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1				1	DIREKTORAT LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN
168	ANALIS DATA DAN INFORMASI	S-1 ILMU HUKUM	1				1	DIREKTORAT PENGENDALIAN APLIKASI INFORMATIKA
169	ANALIS FORENSIK DIGITAL	S-1 ILMU HUKUM	6	2			8	DIREKTORAT PENGENDALIAN APLIKASI INFORMATIKA
170	ANALIS FORENSIK DIGITAL	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER	3	1			4	DIREKTORAT PENGENDALIAN APLIKASI INFORMATIKA
171	ANALIS KONTEN MEDIA SOSIAL	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	16	3	1		20	DIREKTORAT PENGENDALIAN APLIKASI INFORMATIKA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
172	ANALIS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1				1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
173	ANALIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	9				9	DIREKTORAT LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN
174	ANALIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI	S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 SOSIOLOGI	7				7	DIREKTORAT PEMBERDAYAAN INFORMATIKA
175	ANALIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	S-1 AKUNTANSI	1				1	DIREKTORAT TATA KELOLA APLIKASI INFORMATIKA
176	ANALIS PENINDAKAN	S-1 ILMU HUKUM	1				1	DIREKTORAT PENGENDALIAN APLIKASI INFORMATIKA
177	ANALIS PRODUK HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	3				3	DIREKTORAT TATA KELOLA APLIKASI INFORMATIKA
178	ANALIS SISTEM INFORMASI	S-1 ILMU HUKUM / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1				1	DIREKTORAT PENGENDALIAN APLIKASI INFORMATIKA
179	ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI	1				1	DIREKTORAT LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN
180	ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI	1				1	DIREKTORAT PENGENDALIAN APLIKASI INFORMATIKA
181	PEMERIKSA LAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI	1				1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
182	PENGENDALI TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1				1	DIREKTORAT PENGENDALIAN APLIKASI INFORMATIKA
183	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 JURNALISTIK / S-1 KEHUMASAN / D-IV MANAJEMEN PRODUKSI PEMBERITAAN	1				1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
184	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	S-1 MANAJEMEN	1				1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
185	AHLI PERTAMA - PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	D-IV TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INDUSTRI	16				16	BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
186	ANALIS SERTIFIKASI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK FISIKA / S-1 FISIKA / S-1 TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INDUSTRI	5				5	DIREKTORAT STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
187	PENELAHAH DATA DAN INFORMASI SERTIFIKASI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK ELEKTRO	2				2	BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
188	PENELAHAH DATA DAN INFORMASI SERTIFIKASI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI	1	1			2	DIREKTORAT STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
189	PENELAHAH DATA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN OPERATOR RADIO	S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK FISIKA / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU EKONOMI	1				1	DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA
190	PENELAHAH EVALUASI BIAYA HAK PENGGUNAAN DAN PIUTANG SPEKTRUM FREKUENSI RADIO	S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU HUKUM / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU EKONOMI	0	1			1	DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
191	PENELAAH MATERI EVALUASI ANALISA KOMPETENSI OPERATOR RADIO	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER	1				1	DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA
192	PENELAAH MATERI SERTIFIKASI OPERATOR RADIO	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA	1				1	DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA
193	PENELAAH MUTU LAYANAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 FISIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK FISIKA / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1				1	DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA
194	PENELAAH PENETAPAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO (SFR)	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK FISIKA / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 FISIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO	3	1			4	DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA
195	PENELAAH RENCANA PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SPEKTRUM	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM KOMPUTER	1	1			2	DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
196	PENELAAH SERTIFIKASI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	S-1 TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK FISIKA / S-1 FISIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO	12				12	BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
197	PENELAAH SUMBER DAYA MANUSIA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO	S-1 PSIKOLOGI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	1			2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
198	PENGELOLA ANGGARAN	D-III EKONOMI / D-III MANAJEMEN	3				3	DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
199	PENGELOLA BAHAN DAN DATA OBJEK KERJA SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA	D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK ELEKTRO / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III STATISTIKA / D-III TEKNIK TELEKOMUNIKASI / D-III TELEKOMUNIKASI / D-III TEKNIK INDUSTRI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI NEGARA	2				2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
200	PENGELOLA BAHAN KOORDINASI DAN LAPORAN POS DAN INFORMATIKA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV KEARSIPAN / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA	2				2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
201	PENGELOLA BAHAN MATERI HUKUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ D-III TEKNIK TELEKOMUNIKASI / D-III TEKNIK ELEKTRO	2				2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
202	PENGELOLA BAHAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM POS DAN INFORMATIKA	D-III MANAJEMEN/ D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-III ILMU ADMINISTRASI NIAGA / D-III ILMU ADMINISTRASI BISNIS	1		1		2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
203	PENGELOLA DATA KEBIJAKAN PENATAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT	D-III AKUNTANSI	4				4	DIREKTORAT PENATAAN SUMBER DAYA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
204	PENGELOLA DATA SUMBER DAYA LABORATORIUM PENGUJIAN	D-III MANAJEMEN / D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-III ILMU ADMINISTRASI NIAGA / D-III ILMU ADMINISTRASI BISNIS	2				2	BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
205	PENGELOLA DOKUMEN HUKUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT POS DAN TELEKOMUNIKASI	D-III HUKUM	2				2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
206	PENGELOLA KEGIATAN DAN ANGGARAN	D-III AKUNTANSI	2				2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
207	PENGELOLA LAPORAN BMN DAN RUMAH TANGGA POS DAN INFORMATIKA	S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU EKONOMI	1	1			2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
208	PENGELOLA MANAJEMEN MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT INFORMATIKA	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK ELEKTRO/ D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-III ILMU ADMINISTRASI BISNIS / D-III ILMU ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1				1	BALAI MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANJARMASIN
209	PENGELOLA MANAJEMEN MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT INFORMATIKA	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK ELEKTRO/ D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-III ILMU ADMINISTRASI BISNIS / D-III ILMU ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1				1	BALAI MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BATAM

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
210	PENGELOLA MANAJEMEN MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT INFORMATIKA	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK ELEKTRO/ D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-III ILMU ADMINISTRASI BISNIS / D-III ILMU ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	2				2	BALAI MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAMBI
211	PENGELOLA MANAJEMEN MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT INFORMATIKA	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK ELEKTRO/ D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-III ILMU ADMINISTRASI BISNIS / D-III ILMU ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1			1	2	BALAI MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAYAPURA
212	PENGELOLA MANAJEMEN MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT INFORMATIKA	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK ELEKTRO/ D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-III ILMU ADMINISTRASI BISNIS / D-III ILMU ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1				1	BALAI MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG
213	PENGELOLA MANAJEMEN MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT INFORMATIKA	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK ELEKTRO/ D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-III ILMU ADMINISTRASI BISNIS / D-III ILMU ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1				1	BALAI MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MANADO

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
214	PENGELOLA MANAJEMEN MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT INFORMATIKA	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK ELEKTRO/ D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-III ILMU ADMINISTRASI BISNIS / D-III ILMU ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	0			1	1	BALAI MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MERAUKE
215	PENGELOLA MANAJEMEN MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT INFORMATIKA	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK ELEKTRO/ D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-III ILMU ADMINISTRASI BISNIS / D-III ILMU ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1				1	BALAI MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PADANG
216	PENGELOLA MANAJEMEN MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT INFORMATIKA	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK ELEKTRO/ D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-III ILMU ADMINISTRASI BISNIS / D-III ILMU ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1				1	BALAI MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALANGKARAYA
217	PENGELOLA MANAJEMEN MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT INFORMATIKA	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK ELEKTRO/ D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-III ILMU ADMINISTRASI BISNIS / D-III ILMU ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1				1	BALAI MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
218	PENGELOLA MANAJEMEN MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT INFORMATIKA	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK ELEKTRO/ D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-III ILMU ADMINISTRASI BISNIS / D-III ILMU ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1				1	BALAI MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I PALEMBANG
219	PENGELOLA MANAJEMEN MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT INFORMATIKA	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK ELEKTRO/ D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-III ILMU ADMINISTRASI BISNIS / D-III ILMU ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1				1	BALAI MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I PEKANBARU
220	PENGELOLA MANAJEMEN MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT INFORMATIKA	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK ELEKTRO/ D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-III ILMU ADMINISTRASI BISNIS / D-III ILMU ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	2				2	BALAI MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I TANGERANG
221	PENGELOLA MANAJEMEN MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT INFORMATIKA	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK ELEKTRO/ D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-III ILMU ADMINISTRASI BISNIS / D-III ILMU ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1				1	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I JAKARTA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
222	PENGELOLA MANAJEMEN MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT INFORMATIKA	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK ELEKTRO/ D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-III ILMU ADMINISTRASI BISNIS / D-III ILMU ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1				1	LOKA MONITOR SPEKTRUM RADIO AMBON
223	PENGELOLA MANAJEMEN MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT INFORMATIKA	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK ELEKTRO/ D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-III ILMU ADMINISTRASI BISNIS / D-III ILMU ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1				1	LOKA MONITOR SPEKTRUM RADIO GORONTALO
224	PENGELOLA MANAJEMEN MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT INFORMATIKA	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK ELEKTRO/ D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-III ILMU ADMINISTRASI BISNIS / D-III ILMU ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1				1	LOKA MONITOR SPEKTRUM RADIO KENDARI
225	PENGELOLA MANAJEMEN MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT INFORMATIKA	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK ELEKTRO/ D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-III ILMU ADMINISTRASI BISNIS / D-III ILMU ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1				1	LOKA MONITOR SPEKTRUM RADIO MAMUJU

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
226	PENGELOLA MANAJEMEN MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT INFORMATIKA	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK ELEKTRO/ D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-III ILMU ADMINISTRASI BISNIS / D-III ILMU ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1				1	LOKA MONITOR SPEKTRUM RADIO PANGKAL PINANG
227	PENGELOLA MANAJEMEN MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT INFORMATIKA	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK ELEKTRO/ D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-III ILMU ADMINISTRASI BISNIS / D-III ILMU ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1				1	LOKA MONITOR SPEKTRUM RADIO TANJUNG SELOR
228	PENGELOLA MANAJEMEN MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT INFORMATIKA	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK ELEKTRO/ D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-III ILMU ADMINISTRASI BISNIS / D-III ILMU ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1				1	LOKA MONITOR SPEKTRUM RADIO TERNATE
229	PENGELOLA MATERI EKONOMI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI NIRKABEL	D-III TEKNIK ELEKTRO / D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK TELEKOMUNIKASI	2				2	DIREKTORAT PENATAAN SUMBER DAYA
230	PENGELOLA MATERI PENATAAN ALOKASI DINAS SATELIT DAN FILING SATELIT	D-III TEKNIK ELEKTRO / D-III TEKNIK TELEKOMUNIKASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA	2				2	DIREKTORAT PENATAAN SUMBER DAYA
231	PENGELOLA MATERI RENCANA PROGRAM LABORATORIUM PENGUJIAN	D-III TEKNIK INFORMATIKA	2				2	BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
232	PENGELOLA MATERI SELEKSI DAN EVALUASI PITA FREKUENSI RADIO	D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK ELEKTRO / D-III TEKNIK TELEKOMUNIKASI	2				2	DIREKTORAT PENATAAN SUMBER DAYA
233	PENGELOLA PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN POS DAN INFORMATIKA	D-III TEKNIK INFORMATIKA/ D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ D-III TEKNIK ELEKTRO	2				2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
234	PENGELOLA TRANSAKSI DAN BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN POS DAN INFORMATIKA	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN	2				2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
235	PENYUSUN BAHAN PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN ANGGARAN POS DAN INFORMATIKA	S-1 ILMU EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	1	1			2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
236	PENYUSUN DATA KOORDINASI SATELIT	S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI	1	2			3	DIREKTORAT PENATAAN SUMBER DAYA
237	PENYUSUN DATA SISTEM MUTU LABORATORIUM PENGUJIAN	S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2				2	BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
238	PENYUSUN MANAJEMEN PENGENDALIAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT INFORMATIKA	S-1 ILMU EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU HUKUM / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV TEKNIK INFORMATIKA	11	3			14	DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
239	PENYUSUN PENATAAN ALOKASI FREKUENSI	S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK ELEKTRO	5	3			8	DIREKTORAT PENATAAN SUMBER DAYA

B. KEBUTUHAN CPNS PENEMPATAN LPP TVRI

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
			136	18	3	1	158	
240	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN KEUANGAN	2	0	0	0	2	DIREKTORAT UMUM KANTOR PUSAT LPP TVRI
241	PENGELOLA PEMASARAN	D-III EKONOMI / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI NEGARA	2	0	0	0	2	DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN USAHA KANTOR PUSAT LPP TVRI
242	AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 DESAIN INTERIOR / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 TELEVISI DAN FILM / S-1 SENI RUPA / S-1 JURNALISTIK / S-1 PENDIDIKAN TATA RIAS / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU HUKUM / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN	2	1	0	0	3	TVRI WILAYAH INDONESIA JAWA BAGIAN BARAT, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN DKI JAKARTA B. TVRI STASIUN JAWA BARAT

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
243	AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 MULTIMEDIA	1	0	0	0	1	TVRI STASIUN DKI JAKARTA, TVRI WILAYAH INDONESIA JAWA BAGIAN BARAT
244	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	2	0	0	0	2	TVRI WILAYAH INDONESIA JAWA BAGIAN BARAT, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN DKI JAKARTA B. TVRI STASIUN JAWA BARAT
245	PENGELOLA PEMASARAN	D-III EKONOMI / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI NEGARA	1	0	0	0	1	TVRI STASIUN DKI JAKARTA, TVRI WILAYAH INDONESIA JAWA BAGIAN BARAT
246	TERAMPIL - ASISTEN TEKNISI SIARAN	D-III TEKNIK ELEKTRO / D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK ELEKTRONIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNIK MESIN / D-III TEKNOLOGI MULTIMEDIA DAN BROADCASTING / D-III KOMPUTER MULTIMEDIA	3	0	0	0	3	TVRI STASIUN JAWA BARAT, TVRI WILAYAH INDONESIA JAWA BAGIAN BARAT

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
247	AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 DESAIN INTERIOR / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 TELEVISI DAN FILM / S-1 SENI RUPA / S-1 JURNALISTIK / S-1 PENDIDIKAN TATA RIAS / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU HUKUM / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN	2	2	0	0	4	TVRI WILAYAH INDONESIA JAWA BAGIAN TIMUR, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN JAWA TIMUR B. TVRI STASIUN JAWA TENGAH
248	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI	1	0	0	0	1	TVRI STASIUN JAWA TENGAH, TVRI WILAYAH INDONESIA JAWA BAGIAN TIMUR
249	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1	0	1	0	2	TVRI WILAYAH INDONESIA JAWA BAGIAN TIMUR, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN JAWA TIMUR B. TVRI STASIUN D.I. YOGYAKARTA

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
250	PENGELOLA PEMASARAN	D-III EKONOMI / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI NEGARA	2	0	0	0	2	TVRI WILAYAH INDONESIA JAWA BAGIAN TIMUR, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN JAWA TIMUR B. TVRI STASIUN JAWA TENGAH
251	TERAMPIL - ASISTEN TEKNISI SIARAN	D-III TEKNIK ELEKTRO / D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK ELEKTRONIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNIK MESIN / D-III TEKNOLOGI MULTIMEDIA DAN BROADCASTING / D-III KOMPUTER MULTIMEDIA	1	0	0	0	1	TVRI STASIUN JAWA TIMUR, TVRI WILAYAH INDONESIA JAWA BAGIAN TIMUR
252	AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 DESAIN INTERIOR / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 TELEVISI DAN FILM / S-1 SENI RUPA / S-1 JURNALISTIK / S-1 PENDIDIKAN TATA RIAS / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU HUKUM / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN	5	2	0	0	7	TVRI WILAYAH INDONESIA BALI-NUSA TENGGARA, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN BALI B. TVRI STASIUN NUSA TENGGARA TIMUR C. TVRI STASIUN NUSA TENGGARA BARAT

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
253	AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 MULTIMEDIA	4	0	0	0	4	TVRI WILAYAH INDONESIA BALI-NUSA TENGGARA, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN NUSA TENGGARA TIMUR B. TVRI STASIUN NUSA TENGGARA BARAT
254	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN KEUANGAN	1	0	0	0	1	TVRI STASIUN NUSA TENGGARA TIMUR, TVRI WILAYAH INDONESIA BAGIAN TIMUR
255	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	3	0	0	0	3	TVRI WILAYAH INDONESIA BALI-NUSA TENGGARA, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN BALI B. TVRI STASIUN NUSA TENGGARA TIMUR C. TVRI STASIUN NUSA TENGGARA BARAT
256	PENGELOLA PEMASARAN	D-III EKONOMI / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI NEGARA	3	0	0	0	3	TVRI WILAYAH INDONESIA BALI-NUSA TENGGARA, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN BALI B. TVRI STASIUN NUSA TENGGARA TIMUR C. TVRI STASIUN NUSA TENGGARA BARAT

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
257	AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 DESAIN INTERIOR / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 TELEVISI DAN FILM / S-1 SENI RUPA / S-1 JURNALISTIK / S-1 PENDIDIKAN TATA RIAS / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU HUKUM / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN	4	1	0	0	5	TVRI WILAYAH INDONESIA SUMATRA BAGIAN UTARA, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN D.I. ACEH B. TVRI STASIUN SUMATRA UTARA C. TVRI STASIUN RIAU
258	AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 MULTIMEDIA	1	0	0	0	1	TVRI STASIUN RIAU, TVRI WILAYAH INDONESIA SUMATRA BAGIAN UTARA
259	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	3	0	1	0	4	TVRI WILAYAH INDONESIA SUMATRA BAGIAN UTARA, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN D.I. ACEH B. TVRI STASIUN SUMATRA UTARA C. TVRI STASIUN RIAU D. TVRI STASIUN SUMATRA BARAT

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
260	PENGELOLA PEMASARAN	D-III EKONOMI / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI NEGARA	2	0	0	0	2	TVRI WILAYAH INDONESIA SUMATRA BAGIAN UTARA, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN SUMATRA UTARA B. TVRI STASIUN RIAU
261	TERAMPIL - ASISTEN TEKNISI SIARAN	D-III TEKNIK ELEKTRO / D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK ELEKTRONIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNIK MESIN / D-III TEKNOLOGI MULTIMEDIA DAN BROADCASTING / D-III KOMPUTER MULTIMEDIA	1	0	0	0	1	TVRI STASIUN D.I. ACEH, TVRI WILAYAH INDONESIA SUMATRA BAGIAN UTARA
262	AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 DESAIN INTERIOR / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 TELEVISI DAN FILM / S-1 SENI RUPA / S-1 JURNALISTIK / S-1 PENDIDIKAN TATA RIAS / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU HUKUM / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN	2	0	0	0	2	TVRI WILAYAH INDONESIA SUMATRA BAGIAN SELATAN, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN JAMBI B. TVRI STASIUN SUMATRA SELATAN

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
263	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN KEUANGAN	1	0	0	0	1	TVRI STASIUN BANGKA BELITUNG, TVRI WILAYAH INDONESIA SUMATRA BAGIAN SELATAN
264	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	3	0	1	0	4	TVRI WILAYAH INDONESIA SUMATRA BAGIAN SELATAN, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN JAMBI B. TVRI STASIUN BENGKULU C. TVRI STASIUN SUMATRA SELATAN D. TVRI STASIUN LAMPUNG
265	PENGELOLA PEMASARAN	D-III EKONOMI / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI NEGARA	3	0	0	0	3	TVRI WILAYAH INDONESIA SUMATRA BAGIAN SELATAN, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN JAMBI B. TVRI STASIUN SUMATRA SELATAN C. TVRI STASIUN BANGKA BELITUNG
266	TERAMPIL - ASISTEN TEKNISI SIARAN	D-III TEKNIK ELEKTRO / D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK ELEKTRONIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNIK MESIN / D-III TEKNOLOGI MULTIMEDIA DAN BROADCASTING / D-III KOMPUTER MULTIMEDIA	8	0	0	0	8	TVRI WILAYAH INDONESIA SUMATRA BAGIAN SELATAN, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN BENGKULU B. TVRI STASIUN SUMATRA SELATAN C. TVRI STASIUN LAMPUNG

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
267	TERAMPIL - ASISTEN PRANATA SIARAN	D-III PENYIARAN / D-III JURNALISTIK / D-III KOMUNIKASI / D-III TEKNOLOGI MULTIMEDIA DAN BROADCASTING	1	0	0	0	1	TVRI STASIUN SUMATRA SELATAN, TVRI WILAYAH INDONESIA SUMATRA BAGIAN SELATAN
268	AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 DESAIN INTERIOR / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 TELEVISI DAN FILM / S-1 SENI RUPA / S-1 JURNALISTIK / S-1 PENDIDIKAN TATA RIAS / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU HUKUM / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN	5	2	0	0	7	TVRI WILAYAH INDONESIA KALIMANTAN, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN KALIMANTAN SELATAN B. TVRI STASIUN KALIMANTAN TENGAH C. TVRI STASIUN KALIMANTAN TIMUR
269	AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 MULTIMEDIA	5	2	0	0	7	TVRI WILAYAH INDONESIA KALIMANTAN, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN KALIMANTAN SELATAN B. TVRI STASIUN KALIMANTAN BARAT C. TVRI STASIUN KALIMANTAN TENGAH

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
270	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	4	0	0	0	4	TVRI WILAYAH INDONESIA KALIMANTAN, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN KALIMANTAN SELATAN B. TVRI STASIUN KALIMANTAN BARAT C. TVRI STASIUN KALIMANTAN TENGAH D. TVRI STASIUN KALIMANTAN TIMUR
271	PENGELOLA PEMASARAN	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1	0	0	0	1	TVRI STASIUN KALIMANTAN TIMUR, TVRI WILAYAH INDONESIA KALIMANTAN
272	PENGELOLA PEMASARAN	D-III EKONOMI / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI NEGARA	3	0	0	0	3	TVRI WILAYAH INDONESIA KALIMANTAN, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN KALIMANTAN SELATAN B. TVRI STASIUN KALIMANTAN BARAT C. TVRI STASIUN KALIMANTAN TENGAH
273	TERAMPIL - ASISTEN TEKNISI SIARAN	D-III TEKNIK ELEKTRO / D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK ELEKTRONIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNIK MESIN / D-III TEKNOLOGI MULTIMEDIA DAN BROADCASTING / D-III KOMPUTER MULTIMEDIA	6	0	0	0	6	TVRI WILAYAH INDONESIA KALIMANTAN, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN KALIMANTAN SELATAN B. TVRI STASIUN KALIMANTAN TIMUR

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
274	AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 DESAIN INTERIOR / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 TELEVISI DAN FILM / S-1 SENI RUPA / S-1 JURNALISTIK / S-1 PENDIDIKAN TATA RIAS / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU HUKUM / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN	4	2	0	0	6	TVRI WILAYAH INDONESIA SULAWESI BAGIAN UTARA, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN SULAWESI UTARA B. TVRI STASIUN GORONTALO C. TVRI STASIUN SULAWESI TENGAH
275	AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 MULTIMEDIA	1	0	0	0	1	TVRI STASIUN SULAWESI UTARA, TVRI WILAYAH INDONESIA SULAWESI BAGIAN UTARA
276	AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 MULTIMEDIA	1	1	0	0	2	TVRI STASIUN SULAWESI TENGAH, TVRI WILAYAH INDONESIA SULAWESI BAGIAN UTARA
277	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	3	0	0	0	3	TVRI WILAYAH INDONESIA SULAWESI BAGIAN UTARA, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN SULAWESI UTARA B. TVRI STASIUN GORONTALO C. TVRI STASIUN SULAWESI TENGAH

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
278	PENGELOLA PEMASARAN	D-III EKONOMI / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI NEGARA	3	0	0	0	3	TVRI WILAYAH INDONESIA SULAWESI BAGIAN UTARA, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN SULAWESI UTARA B. TVRI STASIUN GORONTALO C. TVRI STASIUN SULAWESI TENGAH
279	TERAMPIL - ASISTEN TEKNISI SIARAN	D-III TEKNIK ELEKTRO / D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK ELEKTRONIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNIK MESIN / D-III TEKNOLOGI MULTIMEDIA DAN BROADCASTING / D-III KOMPUTER MULTIMEDIA	7	0	0	0	7	TVRI WILAYAH INDONESIA SULAWESI BAGIAN UTARA, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN SULAWESI UTARA B. TVRI STASIUN SULAWESI TENGAH
280	AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 DESAIN INTERIOR / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 TELEVISI DAN FILM / S-1 SENI RUPA / S-1 JURNALISTIK / S-1 PENDIDIKAN TATA RIAS / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU HUKUM / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN	4	3	0	0	7	TVRI WILAYAH INDONESIA SULAWESI BAGIAN SELATAN, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN SULAWESI BARAT B. TVRI STASIUN SULAWESI SELATAN C. TVRI STASIUN SULAWESI TENGGARA
281	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	2	0	0	0	2	TVRI WILAYAH INDONESIA SULAWESI BAGIAN SELATAN, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN SULAWESI SELATAN B. TVRI STASIUN SULAWESI TENGGARA

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
282	PENGELOLA PEMASARAN	D-III EKONOMI / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI NEGARA	2	0	0	0	2	TVRI WILAYAH INDONESIA SULAWESI BAGIAN SELATAN, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN SULAWESI BARAT B. TVRI STASIUN SULAWESI TENGGARA
283	TERAMPIL - ASISTEN TEKNISI SIARAN	D-III TEKNIK ELEKTRO / D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK ELEKTRONIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNIK MESIN / D-III TEKNOLOGI MULTIMEDIA DAN BROADCASTING / D-III KOMPUTER MULTIMEDIA	8	0	0	0	8	TVRI WILAYAH INDONESIA SULAWESI BAGIAN SELATAN, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN SULAWESI BARAT B. TVRI STASIUN SULAWESI SELATAN C. TVRI STASIUN SULAWESI TENGGARA
284	AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 DESAIN INTERIOR / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 TELEVISI DAN FILM / S-1 SENI RUPA / S-1 JURNALISTIK / S-1 PENDIDIKAN TATA RIAS / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU HUKUM / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN	4	2	0	0	6	TVRI WILAYAH INDONESIA BAGIAN TIMUR, MELIPUTI : A. TVRI STASIUN MALUKU B. TVRI STASIUN PAPUA

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
285	AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 MULTIMEDIA	3	0	0	0	3	TVRI STASIUN MALUKU, TVRI WILAYAH INDONESIA BAGIAN TIMUR
286	AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 MULTIMEDIA	1	0	0	0	1	TVRI STASIUN PAPUA, TVRI WILAYAH INDONESIA BAGIAN TIMUR
287	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1	0	0	0	1	TVRI STASIUN MALUKU, TVRI WILAYAH INDONESIA BAGIAN TIMUR
288	PENGELOLA PEMASARAN	D-III EKONOMI / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI NEGARA	1	0	0	1	2	TVRI STASIUN PAPUA, TVRI WILAYAH INDONESIA BAGIAN TIMUR

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
289	TERAMPIL - ASISTEN TEKNISI SIARAN	D-III TEKNIK ELEKTRO / D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK ELEKTRONIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER / D- III TEKNIK MESIN / D-III TEKNOLOGI MULTIMEDIA DAN BROADCASTING / D-III KOMPUTER MULTIMEDIA	2	0	0	0	2	TVRI STASIUN MALUKU, TVRI WILAYAH INDONESIA BAGIAN TIMUR

C. KEBUTUHAN CPNS PENEMPATAN LPP RRI

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
			473	54	11	2	540	
290	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	1	3	0	0	4	LPP RRI WILAYAH ACEH : STASIUN RRI BANDA ACEH STASIUN RRI LHOKEUMAWE STASIUN RRI MEULABOH STASIUN RRI TAKENGON
291	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	1	5	0	0	6	LPP RRI WILAYAH BALI/NTB/NTT : STASIUN RRI ATAMBUA STASIUN RRI DENPASAR STASIUN RRI ENDE STASIUN RRI KUPANG STASIUN RRI MATARAM STASIUN RRI SINGARAJA
292	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	1	5	0	0	6	LPP RRI WILAYAH DKI JAKARTA : DIREKTORAT KEUANGAN PUSAT PEMBERITAAN PUSLITBANGDIKLAT SATUAN PENGAWASAN INTERN STASIUN RRI JAKARTA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI
293	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	1	2	0	0	3	LPP RRI WILAYAH JAWA BARAT : STASIUN RRI BANDUNG STASIUN RRI BOGOR STASIUN RRI CIREBON

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
294	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	1	3	0	0	4	LPP RRI WILAYAH JAWA TENGAH/D.I YOGYAKARTA: STASIUN RRI PURWOKERTO STASIUN RRI SEMARANG STASIUN RRI SURAKARTA STASIUN RRI YOGYAKARTA
295	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	1	4	0	0	5	LPP RRI WILAYAH JAWA TIMUR : STASIUN RRI JEMBER STASIUN RRI MADIUN STASIUN RRI MALANG STASIUN RRI SUMENEP STASIUN RRI SURABAYA
296	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	1	7	0	0	8	LPP RRI WILAYAH KALIMANTAN : STASIUN RRI BANJARMASIN STASIUN RRI ENTIKONG STASIUN RRI NUNUKAN STASIUN RRI PALANGKARAYA STASIUN RRI PONTIANAK STASIUN RRI SAMARINDA STASIUN RRI SINTANG STASIUN RRI TARAKAN
297	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	2	1	0	0	3	LPP RRI WILAYAH MALUKU/MALUKU UTARA : STASIUN RRI AMBON STASIUN RRI TERNATE STASIUN RRI TUAL

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
298	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	3	7	0	0	10	LPP RRI WILAYAH PAPUA/PAPUA BARAT : STASIUN RRI BIAK STASIUN RRI BOVEN DIGOEL STASIUN RRI FAK FAK STASIUN RRI JAYAPURA STASIUN RRI MANOKWARI STASIUN RRI MERAUKE STASIUN RRI NABIRE STASIUN RRI SERUI STASIUN RRI SORONG STASIUN RRI WAMENA
299	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	1	6	0	0	7	LPP RRI WILAYAH SULAWESI: STASIUN RRI GORONTALO STASIUN RRI KENDARI STASIUN RRI MAKASSAR STASIUN RRI MANADO STASIUN RRI PALU STASIUN RRI TAHUNA STASIUN RRI TOLI TOLI
300	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	1	5	0	0	6	LPP RRI WILAYAH SUMATRA BARAT / RIAU / KEPULAUAN RIAU: STASIUN RRI BATAM STASIUN RRI BUKITTINGGI STASIUN RRI PADANG STASIUN RRI PEKANBARU STASIUN RRI RANAI STASIUN RRI TANJUNGPINANG

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
301	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	1	4	0	0	5	LPP RRI WILAYAH SUMATRA SELATAN/BANDAR LAMPUNG/BENGKULU/JAMBI/BANGKA BELITUNG: STASIUN RRI BANDAR LAMPUNG STASIUN RRI BENGKULU STASIUN RRI JAMBI STASIUN RRI PALEMBANG STASIUN RRI SUNGAILIAT
302	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	1	2	0	0	3	LPP RRI WILAYAH SUMATRA UTARA : STASIUN RRI GUNUNG SITOLI STASIUN RRI MEDAN STASIUN RRI SIBOLGA
303	PENGELOLA PEMASARAN	D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	3	0	0	0	3	LPP RRI WILAYAH ACEH : STASIUN RRI BANDA ACEH STASIUN RRI LHOKSEUMAWE STASIUN RRI MEULABOH
304	PENGELOLA PEMASARAN	D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	5	0	0	0	5	LPP RRI WILAYAH BALI/NTB/NTT : STASIUN RRI DENPASAR STASIUN RRI ENDE STASIUN RRI KUPANG STASIUN RRI MATARAM STASIUN RRI SINGARAJA
305	PENGELOLA PEMASARAN	D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	2	0	1	0	3	LPP RRI WILAYAH DKI JAKARTA : DIREKTORAT LAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA STASIUN RRI JAKARTA
306	PENGELOLA PEMASARAN	D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	3	0	0	0	3	LPP RRI WILAYAH JAWA BARAT : STASIUN RRI BANDUNG STASIUN RRI BOGOR STASIUN RRI CIREBON

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
307	PENGELOLA PEMASARAN	D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	3	0	1	0	4	LPP RRI WILAYAH JAWA TENGAH/D.I YOGYAKARTA : STASIUN RRI PURWOKERTO STASIUN RRI SEMARANG STASIUN RRI SURAKARTA STASIUN RRI YOGYAKARTA
308	PENGELOLA PEMASARAN	D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	5	0	0	0	5	LPP RRI WILAYAH JAWA TIMUR : STASIUN RRI JEMBER STASIUN RRI MADIUN STASIUN RRI MALANG STASIUN RRI SUMENEP STASIUN RRI SURABAYA
309	PENGELOLA PEMASARAN	D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	6	0	0	0	6	LPP RRI WILAYAH KALIMANTAN : STASIUN RRI BANJARMASIN STASIUN RRI PALANGKARAYA STASIUN RRI PONTIANAK STASIUN RRI SAMARINDA STASIUN RRI SINTANG STASIUN RRI TARAKAN
310	PENGELOLA PEMASARAN	D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	3	0	0	0	3	LPP RRI WILAYAH MALUKU/MALUKU UTARA : STASIUN RRI AMBON STASIUN RRI TERNATE STASIUN RRI TUAL

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
311	PENGELOLA PEMASARAN	D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	9	0	0	0	9	LPP RRI WILAYAH PAPUA/PAPUA BARAT : STASIUN RRI BIAK STASIUN RRI FAK FAK STASIUN RRI JAYAPURA STASIUN RRI MANOKWARI STASIUN RRI MERAUKE STASIUN RRI NABIRE STASIUN RRI SERUI STASIUN RRI SORONG STASIUN RRI WAMENA
312	PENGELOLA PEMASARAN	D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	6	0	0	0	6	LPP RRI WILAYAH SULAWESI : STASIUN RRI GORONTALO STASIUN RRI MAKASSAR STASIUN RRI MANADO STASIUN RRI PALU STASIUN RRI TAHUNA STASIUN RRI TOLI TOLI
313	PENGELOLA PEMASARAN	D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	5	0	0	0	5	LPP RRI WILAYAH SUMATERA BARAT / RIAU / KEPULAUAN RIAU : STASIUN RRI BUKITTINGGI STASIUN RRI PADANG STASIUN RRI PEKANBARU STASIUN RRI RANAI STASIUN RRI TANJUNGPINANG

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
314	PENGELOLA PEMASARAN	D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	4	0	1	0	5	LPP RRI WILAYAH SUMATRA SELATAN/BANDAR LAMPUNG/BENKULU/JAMBI/BANGKA BELITUNG: STASIUN RRI BANDAR LAMPUNG STASIUN RRI BENKULU STASIUN RRI JAMBI STASIUN RRI PALEMBANG STASIUN RRI SUNGAILIAT
315	PENGELOLA PEMASARAN	D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	3	0	0	0	3	LPP RRI WILAYAH SUMATERA UTARA : STASIUN RRI GUNUNG SITOLI STASIUN RRI MEDAN STASIUN RRI SIBOLGA
316	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	4	0	0	0	4	LPP RRI WILAYAH BANDA ACEH: STASIUN RRI BANDA ACEH STASIUN RRI LHOKSEUMAWA STASIUN RRI MEULABOH STASIUN RRI TAKENGON
317	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	6	0	0	0	6	LPP RRI WILAYAH BALI/NTT/NTB: STASIUN RRI ATAMBUA STASIUN RRI DENPASAR STASIUN RRI ENDE STASIUN RRI KUPANG STASIUN RRI MATARAM STASIUN RRI SINGARAJA

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
318	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	6	0	0	0	6	LPP RRI WILAYAH DKI JAKARTA: DIREKTORAT KEUANGAN PUSAT PEMBERITAAN PUSLITBANGDIKLAT SATUAN PENGAWASAN INTERN STASIUN RRI JAKARTA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI
319	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	2	0	1	0	3	LPP RRI WILAYAH JAWA BARAT: STASIUN RRI BANDUNG STASIUN RRI BOGOR STASIUN RRI CIREBON
320	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	4	0	0	0	4	LPP RRI WILAYAH JAWA TENGAH/D.I YOGYAKARTA: STASIUN RRI PURWOKERTO STASIUN RRI SEMARANG STASIUN RRI SURAKARTA STASIUN RRI YOGYAKARTA
321	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	5	0	0	0	5	LPP RRI WILAYAH JAWA TIMUR: STASIUN RRI JEMBER STASIUN RRI MADIUN STASIUN RRI MALANG STASIUN RRI SUMENEP STASIUN RRI SURABAYA

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
322	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	8	0	0	0	8	LPP RRI WILAYAH KALIMANTAN: STASIUN RRI BANJARMASIN STASIUN RRI ENTIKONG STASIUN RRI NUNUKAN STASIUN RRI PALANGKARAYA STASIUN RRI PONTIANAK STASIUN RRI SAMARINDA STASIUN RRI SINTANG STASIUN RRI TARAKAN
323	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	3	0	0	0	3	LPP RRI WILAYAH MALUKU/MALUKU UTARA: STASIUN RRI AMBON STASIUN RRI TERNATE STASIUN RRI TUAL
324	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	10	0	0	0	10	LPP RRI WILAYAH PAPUA/PAPUA BARAT; STASIUN RRI BIAK STASIUN RRI BOVEN DIGOEL STASIUN RRI FAK FAK STASIUN RRI JAYAPURA STASIUN RRI MANOKWARI STASIUN RRI MERAUKE STASIUN RRI NABIRE STASIUN RRI SERUI STASIUN RRI SORONG STASIUN RRI WAMENA

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
325	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	7	0	0	0	7	LPP RRI WILAYAH SULAWESI: STASIUN RRI GORONTALO STASIUN RRI KENDARI STASIUN RRI MAKASSAR STASIUN RRI MANADO STASIUN RRI PALU STASIUN RRI TAHUNA STASIUN RRI TOLI TOLI
326	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	6	0	0	0	6	LPP RRI WILAYAH SUMATRA BARAT/RIAU/KEPULAUAN RIAU: STASIUN RRI BATAM STASIUN RRI BUKITTINGGI STASIUN RRI PADANG STASIUN RRI PEKANBARU STASIUN RRI RANAI STASIUN RRI TANJUNGPINANG
327	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	5	0	0	0	5	LPP RRI WILAYAH SUMATRA SELATAN: STASIUN RRI BANDAR LAMPUNG STASIUN RRI BENGKULU STASIUN RRI JAMBI STASIUN RRI PALEMBANG STASIUN RRI SUNGAILIAT
328	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	3	0	0	0	3	LPP RRI WILAYAH SUMATERA UTARA: STASIUN RRI GUNUNG SITOLI STASIUN RRI MEDAN STASIUN RRI SIBOLGA

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
329	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	4	0	0	0	4	LPP RRI WILAYAH ACEH : STASIUN RRI BANDA ACEH STASIUN RRI LHOKSEUMAWE STASIUN RRI MEULABOH STASIUN RRI TAKENGON
330	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	6	0	0	0	6	LPP RRI WILAYAH BALI/NTB/NTT : STASIUN RRI ATAMBUA STASIUN RRI DENPASAR STASIUN RRI ENDE STASIUN RRI KUPANG STASIUN RRI MATARAM STASIUN RRI SINGARAJA
331	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	4	0	2	0	6	LPP RRI WILAYAH DKI JAKARTA : DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM PUSAT PEMBERITAAN PUSLITBANGDIKLAT SATUAN PENGAWASAN INTERN STASIUN RRI JAKARTA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI
332	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	2	0	1	0	3	LPP RRI WILAYAH JAWA BARAT : STASIUN RRI BANDUNG STASIUN RRI BOGOR STASIUN RRI CIREBON

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
333	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	3	0	1	0	4	LPP RRI WILAYAH JAWA TENGAH/D.I YOGYAKARTA: STASIUN RRI PURWOKERTO STASIUN RRI SEMARANG STASIUN RRI SURAKARTA STASIUN RRI YOGYAKARTA
334	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	4	0	1	0	5	LPP RRI WILAYAH JAWA TIMUR : STASIUN RRI JEMBER STASIUN RRI MADIUN STASIUN RRI MALANG STASIUN RRI SUMENEP STASIUN RRI SURABAYA
335	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	8	0	0	0	8	LPP RRI WILAYAH KALIMANTAN : STASIUN RRI BANJARMASIN STASIUN RRI ENTIKONG STASIUN RRI NUNUKAN STASIUN RRI PALANGKARAYA STASIUN RRI PONTIANAK STASIUN RRI SAMARINDA STASIUN RRI SINTANG STASIUN RRI TARAKAN
336	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	3	0	0	0	3	LPP RRI WILAYAH MALUKU/MALUKU UTARA : STASIUN RRI AMBON STASIUN RRI TERNATE STASIUN RRI TUAL

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
337	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	10	0	0	0	10	LPP RRI WILAYAH PAPUA/PAPUA BARAT : STASIUN RRI BIAK STASIUN RRI BOVEN DIGOEL STASIUN RRI FAK FAK STASIUN RRI JAYAPURA STASIUN RRI MANOKWARI STASIUN RRI MERAUKE STASIUN RRI NABIRE STASIUN RRI SERUI STASIUN RRI SORONG STASIUN RRI WAMENA
338	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	6	0	1	0	7	LPP RRI WILAYAH SULAWESI : STASIUN RRI GORONTALO STASIUN RRI KENDARI STASIUN RRI MAKASSAR STASIUN RRI MANADO STASIUN RRI PALU STASIUN RRI TAHUNA STASIUN RRI TOLI TOLI
339	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	6	0	0	0	6	LPP RRI WILAYAH SUMATRA BARAT / RIAU / KEPULAUAN RIAU : STASIUN RRI BATAM STASIUN RRI BUKITTINGGI STASIUN RRI PADANG STASIUN RRI PEKANBARU STASIUN RRI RANAI STASIUN RRI TANJUNGPINANG

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
340	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	5	0	0	0	5	LPP RRI WILAYAH SUMATRA SELATAN/BANDAR LAMPUNG/BENGKULU/JAMBI/BANGKA BELITUNG: STASIUN RRI BANDAR LAMPUNG STASIUN RRI BENGKULU STASIUN RRI JAMBI STASIUN RRI PALEMBANG STASIUN RRI SUNGAILIAT
341	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	3	0	0	0	3	LPP RRI WILAYAH SUMATRA UTARA : STASIUN RRI GUNUNG SITOLI STASIUN RRI MEDAN STASIUN RRI SIBOLGA
342	AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	S-1 SOSIOLOGI / D-IV MANAJEMEN PRODUKSI PEMBERITAAN / S-1 BROADCASTING / D-IV MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI	3	0	0	0	3	LPP RRI WILAYAH ACEH : STASIUN RRI LHOKSEUMAWA STASIUN RRI MEULABOH STASIUN RRI TAKENGON
343	AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	S-1 SOSIOLOGI / D-IV MANAJEMEN PRODUKSI PEMBERITAAN / S-1 BROADCASTING / D-IV MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI	4	0	0	0	4	LPP RRI WILAYAH BALI/NTB/NTT : STASIUN RRI DENPASAR STASIUN RRI ENDE STASIUN RRI KUPANG STASIUN RRI SINGARAJA
344	AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	S-1 SOSIOLOGI / D-IV MANAJEMEN PRODUKSI PEMBERITAAN / S-1 BROADCASTING / D-IV MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	0	0	0	1	LPP RRI WILAYAH DKI JAKARTA: STASIUN RRI JAKARTA

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
345	AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	S-1 SOSIOLOGI / D-IV MANAJEMEN PRODUKSI PEMBERITAAN / S-1 BROADCASTING / D-IV MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	0	0	0	2	LPP RRI WILAYAH JAWA TENGAH/D.I YOGYAKARTA: STASIUN RRI SEMARANG STASIUN RRI YOGYAKARTA
346	AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	S-1 SOSIOLOGI / D-IV MANAJEMEN PRODUKSI PEMBERITAAN / S-1 BROADCASTING / D-IV MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	0	0	0	1	LPP RRI WILAYAH JAWA TIMUR: STASIUN RRI SUMENEP
347	AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	S-1 SOSIOLOGI / D-IV MANAJEMEN PRODUKSI PEMBERITAAN / S-1 BROADCASTING / D-IV MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI	5	0	0	0	5	LPP RRI WILAYAH KALIMANTAN : STASIUN RRI PALANGKARAYA STASIUN RRI PONTIANAK STASIUN RRI SAMARINDA STASIUN RRI SINTANG STASIUN RRI TARAKAN
348	AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	S-1 SOSIOLOGI / D-IV MANAJEMEN PRODUKSI PEMBERITAAN / S-1 BROADCASTING / D-IV MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	0	0	0	1	LPP RRI WILAYAH MALUKU/MALUKU UTARA: STASIUN RRI TUAL
349	AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	S-1 SOSIOLOGI / D-IV MANAJEMEN PRODUKSI PEMBERITAAN / S-1 BROADCASTING / D-IV MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI	3	0	0	2	5	LPP RRI WILAYAH PAPUA/PAPUA BARAT : STASIUN RRI BOVEN DIGOEL STASIUN RRI JAYAPURA STASIUN RRI MANOKWARI STASIUN RRI SORONG STASIUN RRI WAMENA

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
350	AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	S-1 SOSIOLOGI / D-IV MANAJEMEN PRODUKSI PEMBERITAAN / S-1 BROADCASTING / D-IV MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI	5	0	0	0	5	LPP RRI WILAYAH SULAWESI: STASIUN RRI MAKASSAR STASIUN RRI MANADO STASIUN RRI PALU STASIUN RRI TAHUNA STASIUN RRI TOLI TOLI
351	AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	S-1 SOSIOLOGI / D-IV MANAJEMEN PRODUKSI PEMBERITAAN / S-1 BROADCASTING / D-IV MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI	5	0	0	0	5	LPP RRI WILAYAH SUMATERA BARAT / RIAU / KEPULAUAN RIAU : STASIUN RRI BATAM STASIUN RRI BUKITTINGGI STASIUN RRI PADANG STASIUN RRI RANAI STASIUN RRI TANJUNGPINANG
352	AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	S-1 SOSIOLOGI / D-IV MANAJEMEN PRODUKSI PEMBERITAAN / S-1 BROADCASTING / D-IV MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	0	0	0	2	LPP RRI WILAYAH SUMATRA SELATAN/BANDAR LAMPUNG/BENGKULU/JAMBI/BANGKA BELITUNG: STASIUN RRI JAMBI STASIUN RRI SUNGAILIAT
353	AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	S-1 SOSIOLOGI / D-IV MANAJEMEN PRODUKSI PEMBERITAAN / S-1 BROADCASTING / D-IV MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI	3	0	0	0	3	LPP RRI WILAYAH SUMATRA UTARA : STASIUN RRI GUNUNG SITOLI STASIUN RRI MEDAN STASIUN RRI SIBOLGA
354	AHLI PERTAMA - WIDYAISWARA	S-2 KOMUNIKASI / S-2 INFORMATIKA	3	0	0	0	3	LPP RRI WILAYAH DKI JAKARTA: PUSLITBANGDIKLAT

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
355	PENGELOLA ANGGARAN	D-III AKUNTANSI	4	0	0	0	4	LPP RRI WILAYAH ACEH : STASIUN RRI BANDA ACEH STASIUN RRI LHOKSEUMAWE STASIUN RRI MEULABOH STASIUN RRI TAKENGON
356	PENGELOLA ANGGARAN	D-III AKUNTANSI	6	0	0	0	6	LPP RRI WILAYAH BALI/NTB/NTT: STASIUN RRI ATAMBUA STASIUN RRI DENPASAR STASIUN RRI ENDE STASIUN RRI KUPANG STASIUN RRI MATARAM STASIUN RRI SINGARAJA
357	PENGELOLA ANGGARAN	D-III AKUNTANSI	5	0	1	0	6	LPP RRI WILAYAH DKI JAKARTA : DIREKTORAT KEUANGAN PUSAT PEMBERITAAN PUSLITBANGDIKLAT SATUAN PENGAWASAN INTERN STASIUN RRI JAKARTA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI
358	PENGELOLA ANGGARAN	D-III AKUNTANSI	3	0	0	0	3	LPP RRI WILAYAH JAWA BARAT: STASIUN RRI BANDUNG STASIUN RRI BOGOR STASIUN RRI CIREBON
359	PENGELOLA ANGGARAN	D-III AKUNTANSI	4	0	0	0	4	LPP RRI WILAYAH JAWA TENGAH/D.I YOGYAKARTA: STASIUN RRI PURWOKERTO STASIUN RRI SEMARANG STASIUN RRI SURAKARTA STASIUN RRI YOGYAKARTA

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
360	PENGELOLA ANGGARAN	D-III AKUNTANSI	5	0	0	0	5	LPP RRI WILAYAH JAWA TIMUR: STASIUN RRI JEMBER STASIUN RRI MADIUN STASIUN RRI MALANG STASIUN RRI SUMENEP STASIUN RRI SURABAYA
361	PENGELOLA ANGGARAN	D-III AKUNTANSI	8	0	0	0	8	LPP RRI WILAYAH KALIMANTAN : STASIUN RRI BANJARMASIN STASIUN RRI ENTIKONG STASIUN RRI NUNUKAN STASIUN RRI PALANGKARAYA STASIUN RRI PONTIANAK STASIUN RRI SAMARINDA STASIUN RRI SINTANG STASIUN RRI TARAKAN
362	PENGELOLA ANGGARAN	D-III AKUNTANSI	3	0	0	0	3	LPP RRI WILAYAH MALUKU/MALUKU UTARA: STASIUN RRI AMBON STASIUN RRI TERNATE STASIUN RRI TUAL

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
363	PENGELOLA ANGGARAN	D-III AKUNTANSI	10	0	0	0	10	LPP RRI WILAYAH PAPUA/PAPUA BARAT: STASIUN RRI BIAK STASIUN RRI BOVEN DIGOEL STASIUN RRI FAK FAK STASIUN RRI JAYAPURA STASIUN RRI MANOKWARI STASIUN RRI MERAUKE STASIUN RRI NABIRE STASIUN RRI SERUI STASIUN RRI SORONG STASIUN RRI WAMENA
364	PENGELOLA ANGGARAN	D-III AKUNTANSI	7	0	0	0	7	LPP RRI WILAYAH SULAWESI: STASIUN RRI GORONTALO STASIUN RRI KENDARI STASIUN RRI MAKASSAR STASIUN RRI MANADO STASIUN RRI PALU STASIUN RRI TAHUNA STASIUN RRI TOLI TOLI
365	PENGELOLA ANGGARAN	D-III AKUNTANSI	6	0	0	0	6	LPP RRI WILAYAH SUMATERA BARAT/RIAU/KEPULAUAN RIAU: STASIUN RRI BATAM STASIUN RRI BUKITTINGGI STASIUN RRI PADANG STASIUN RRI PEKANBARU STASIUN RRI RANAI STASIUN RRI TANJUNGPINANG

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
366	PENGELOLA ANGGARAN	D-III AKUNTANSI	5	0	0	0	5	LPP RRI WILAYAH SUMATERA SELATAN/BANDAR LAMPUNG/BENGKULU/JAMBI/BANGKA BELITUNG: STASIUN RRI BANDAR LAMPUNG STASIUN RRI BENGKULU STASIUN RRI JAMBI STASIUN RRI PALEMBANG STASIUN RRI SUNGAILIAT
367	PENGELOLA ANGGARAN	D-III AKUNTANSI	3	0	0	0	3	LPP RRI WILAYAH SUMATERA UTARA: STASIUN RRI GUNUNG SITOLI STASIUN RRI MEDAN STASIUN RRI SIBOLGA
368	AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	S-1 TEKNIK ELEKTRO / D-IV MANAJEMEN TEKNIK STUDIO PRODUKSI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN	2	0	0	0	2	LPP RRI WILAYAH ACEH : STASIUN RRI BANDA ACEH STASIUN RRI MEULABOH
369	AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 MULTIMEDIA / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-IV MANAJEMEN TEKNIK STUDIO PRODUKSI / D-IV MANAJEMEN TEKNIK TRANSMISI	2	0	0	0	2	LPP RRI WILAYAH NTB: STASIUN RRI ENDE STASIUN RRI MATARAM
370	AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	S-1 TEKNIK ELEKTRO / D-IV MANAJEMEN TEKNIK STUDIO PRODUKSI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN	2	0	0	0	2	LPP RRI WILAYAH BALI/NTT: STASIUN RRI ATAMBUA STASIUN RRI DENPASAR

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
371	AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	S-1 TEKNIK ELEKTRO / D-IV MANAJEMEN TEKNIK STUDIO PRODUKSI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN	1	0	0	0	1	LPP RRI WILAYAH DKI JAKARTA: PUSAT PEMBERITAAN
372	AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 MULTIMEDIA / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-IV MANAJEMEN TEKNIK STUDIO PRODUKSI / D-IV MANAJEMEN TEKNIK TRANSMISI	1	0	0	0	1	LPP RRI WILAYAH JAWA TIMUR: STASIUN RRI MADIUN
373	AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 MULTIMEDIA / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-IV MANAJEMEN TEKNIK STUDIO PRODUKSI / D-IV MANAJEMEN TEKNIK TRANSMISI	1	0	0	0	1	LPP RRI WILAYAH KALIMANTAN : STASIUN RRI ENTIKONG
374	AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 MULTIMEDIA / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-IV MANAJEMEN TEKNIK STUDIO PRODUKSI / D-IV MANAJEMEN TEKNIK TRANSMISI	1	0	0	0	1	LPP RRI WILAYAH MALUKU/MALUKU UTARA: STASIUN RRI TERNATE
375	AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	S-1 TEKNIK ELEKTRO / D-IV MANAJEMEN TEKNIK STUDIO PRODUKSI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN	4	0	0	0	4	LPP RRI WILAYAH PAPUA/PAPUA BARAT: STASIUN RRI BIAK STASIUN RRI BOVEN DIGOEL STASIUN RRI JAYAPURA STASIUN RRI SORONG

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
376	AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 MULTIMEDIA / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-IV MANAJEMEN TEKNIK STUDIO PRODUKSI / D-IV MANAJEMEN TEKNIK TRANSMISI	1	0	0	0	1	STASIUN RRI MANOKWARI
377	AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 MULTIMEDIA / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-IV MANAJEMEN TEKNIK STUDIO PRODUKSI / D-IV MANAJEMEN TEKNIK TRANSMISI	1	0	0	0	1	STASIUN RRI MERAUKE
378	AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	S-1 TEKNIK ELEKTRO / D-IV MANAJEMEN TEKNIK STUDIO PRODUKSI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN	1	0	0	0	1	LPP RRI WILAYAH SULAWESI: STASIUN RRI TAHUNA
379	AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	S-1 TEKNIK ELEKTRO / D-IV MANAJEMEN TEKNIK STUDIO PRODUKSI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN	1	0	0	0	1	LPP RRI WILAYAH SUMATERA BARAT/RIAU/KEPULAUAN RIAU: STASIUN RRI PADANG

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
380	AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	S-1 TEKNIK ELEKTRO / D-IV MANAJEMEN TEKNIK STUDIO PRODUKSI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN	1	0	0	0	1	STASIUN RRI BANDAR LAMPUNG
381	AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 MULTIMEDIA / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-IV MANAJEMEN TEKNIK STUDIO PRODUKSI / D-IV MANAJEMEN TEKNIK TRANSMISI	1	0	0	0	1	STASIUN RRI PALEMBANG
382	VERIFIKATOR PAJAK	D-III PAJAK / D-III PERPAJAKAN	4	0	0	0	4	LPP RRI WILAYAH ACEH : STASIUN RRI BANDA ACEH STASIUN RRI LHOKSEUMAWA STASIUN RRI MEULABOH STASIUN RRI TAKENGON
383	VERIFIKATOR PAJAK	D-III PAJAK / D-III PERPAJAKAN	6	0	0	0	6	LPP RRI WILAYAH BALI/NTB/NTT : STASIUN RRI ATAMBUA STASIUN RRI DENPASAR STASIUN RRI ENDE STASIUN RRI KUPANG STASIUN RRI MATARAM STASIUN RRI SINGARAJA

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
384	VERIFIKATOR PAJAK	D-III PAJAK / D-III PERPAJAKAN	6	0	0	0	6	LPP RRI WILAYAH DKI JAKARTA : DIREKTORAT KEUANGAN PUSAT PEMBERITAAN PUSLITBANGDIKLAT SATUAN PENGAWASAN INTERN STASIUN RRI JAKARTA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI
385	VERIFIKATOR PAJAK	D-III PAJAK / D-III PERPAJAKAN	3	0	0	0	3	LPP RRI WILAYAH JAWA BARAT : STASIUN RRI BANDUNG STASIUN RRI CIREBON STASIUN RRI BOGOR
386	VERIFIKATOR PAJAK	D-III PAJAK / D-III PERPAJAKAN	4	0	0	0	4	LPP RRI WILAYAH JAWA TENGAH /D.I YOGYAKARTA : STASIUN RRI PURWOKERTO STASIUN RRI SEMARANG STASIUN RRI SURAKARTA STASIUN RRI Yogyakarta
387	VERIFIKATOR PAJAK	D-III PAJAK / D-III PERPAJAKAN	5	0	0	0	5	LPP RRI WILAYAH JAWA TIMUR : STASIUN RRI JEMBER STASIUN RRI MADIUN STASIUN RRI MALANG STASIUN RRI SUMENEP STASIUN RRI SURABAYA

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
388	VERIFIKATOR PAJAK	D-III PAJAK / D-III PERPAJAKAN	8	0	0	0	8	LPP RRI WILAYAH KALIMANTAN : STASIUN RRI BANJARMASIN STASIUN RRI ENTIKONG STASIUN RRI NUNUKAN STASIUN RRI PALANGKARAYA STASIUN RRI PONTIANAK STASIUN RRI SAMARINDA STASIUN RRI SINTANG STASIUN RRI TARAKAN
389	VERIFIKATOR PAJAK	D-III PAJAK / D-III PERPAJAKAN	3	0	0	0	3	LPP RRI WILAYAH MALUKU/MALUKU UTARA : STASIUN RRI AMBON STASIUN RRI TERNATE STASIUN RRI TUAL
390	VERIFIKATOR PAJAK	D-III PAJAK / D-III PERPAJAKAN	10	0	0	0	10	LPP RRI WILAYAH PAPUA/PAPUA BARAT: STASIUN RRI BIAK STASIUN RRI BOVEN DIGOEL STASIUN RRI FAK FAK STASIUN RRI JAYAPURA STASIUN RRI MANOKWARI STASIUN RRI MERAUKE STASIUN RRI NABIRE STASIUN RRI SERUI STASIUN RRI SORONG STASIUN RRI WAMENA

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
391	VERIFIKATOR PAJAK	D-III PAJAK / D-III PERPAJAKAN	7	0	0	0	7	LPP RRI WILAYAH SULAWESI : STASIUN RRI GORONTALO STASIUN RRI KENDARI STASIUN RRI MAKASSAR STASIUN RRI MANADO STASIUN RRI PALU STASIUN RRI TAHUNA STASIUN RRI TOLI TOLI
392	VERIFIKATOR PAJAK	D-III PAJAK / D-III PERPAJAKAN	6	0	0	0	6	LPP RRI WILAYAH SUMATERA BARAT / RIAU / KEPULAUAN RIAU : STASIUN RRI BATAM STASIUN RRI BUKITTINGGI STASIUN RRI PADANG STASIUN RRI PEKANBARU STASIUN RRI RANAI STASIUN RRI TANJUNGPINANG
393	VERIFIKATOR PAJAK	D-III PAJAK / D-III PERPAJAKAN	5	0	0	0	5	LPP RRI WILAYAH SUMATERA SELATAN / BANDAR LAMPUNG/BENGGULU/JAMBI/BANGKA BELITUNG: STASIUN RRI BANDAR LAMPUNG STASIUN RRI BENGGULU STASIUN RRI JAMBI STASIUN RRI PALEMBANG STASIUN RRI SUNGAILIAT
394	VERIFIKATOR PAJAK	D-III PAJAK / D-III PERPAJAKAN	3	0	0	0	3	LPP RRI WILAYAH SUMATERA UTARA : STASIUN RRI GUNUNG SITOLI STASIUN RRI MEDAN STASIUN RRI SIBOLGA

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
395	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN KEUANGAN	4	0	0	0	4	LPP RRI WILAYAH ACEH : STASIUN RRI BANDA ACEH STASIUN RRI LHOKSEUMAWA STASIUN RRI MEULABOH STASIUN RRI TAKENGON
396	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN KEUANGAN	6	0	0	0	6	LPP RRI WILAYAH BALI/NTB/NTT : STASIUN RRI ATAMBUA STASIUN RRI DENPASAR STASIUN RRI ENDE STASIUN RRI KUPANG STASIUN RRI MATARAM STASIUN RRI SINGARAJA
397	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN KEUANGAN	6	0	0	0	6	LPP RRI WILAYAH DKI JAKARTA : DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM PUSAT PEMBERITAAN PUSLITBANGDIKLAT SATUAN PENGAWASAN INTERN STASIUN RRI JAKARTA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI
398	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN KEUANGAN	3	0	0	0	3	LPP RRI WILAYAH JAWA BARAT : STASIUN RRI BANDUNG STASIUN RRI BOGOR STASIUN RRI CIREBON
399	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN KEUANGAN	4	0	0	0	4	LPP RRI WILAYAH JAWA TENGAH /D.I YOGYAKARTA : STASIUN RRI PURWOKERTO STASIUN RRI SEMARANG STASIUN RRI SURAKARTA STASIUN RRI YOGYAKARTA

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
400	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN KEUANGAN	5	0	0	0	5	LPP RRI WILAYAH JAWA TIMUR : STASIUN RRI JEMBER STASIUN RRI MADIUN STASIUN RRI MALANG STASIUN RRI SUMENEP STASIUN RRI SURABAYA
401	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN KEUANGAN	8	0	0	0	8	LPP RRI WILAYAH KALIMANTAN : STASIUN RRI BANJARMASIN STASIUN RRI ENTIKONG STASIUN RRI NUNUKAN STASIUN RRI PALANGKARAYA STASIUN RRI PONTIANAK STASIUN RRI SAMARINDA STASIUN RRI SINTANG STASIUN RRI TARAKAN
402	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN KEUANGAN	3	0	0	0	3	LPP RRI WILAYAHMALUKU/MALUKU UTARA : STASIUN RRI AMBON STASIUN RRI TERNATE STASIUN RRI TUAL

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
403	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN KEUANGAN	10	0	0	0	10	LPP RRI WILAYAH PAPUA/PAPUA BARAT : STASIUN RRI BIAK STASIUN RRI BOVEN DIGOEL STASIUN RRI FAK FAK STASIUN RRI JAYAPURA STASIUN RRI MANOKWARI STASIUN RRI MERAUKE STASIUN RRI NABIRE STASIUN RRI SERUI STASIUN RRI SORONG STASIUN RRI WAMENA
404	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN KEUANGAN	7	0	0	0	7	LPP RRI WILAYAH SULAWESI : STASIUN RRI GORONTALO STASIUN RRI KENDARI STASIUN RRI MAKASSAR STASIUN RRI MANADO STASIUN RRI PALU STASIUN RRI TAHUNA STASIUN RRI TOLI TOLI
405	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN KEUANGAN	6	0	0	0	6	LPP RRI WILAYAH SUMATERA BARAT / RIAU / KEPULAUAN RIAU : STASIUN RRI BATAM STASIUN RRI BUKITTINGGI STASIUN RRI PADANG STASIUN RRI PEKANBARU STASIUN RRI RANAI STASIUN RRI TANJUNGPINANG

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
			U	C	D	P		
406	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN KEUANGAN	5	0	0	0	5	LPP RRI WILAYAH SUMATERA SELATAN BANDAR LAMPUNG/BENGGKULU/JAMBI/BANGKA BELITUNG: STASIUN RRI BANDAR LAMPUNG STASIUN RRI BENGGKULU STASIUN RRI JAMBI STASIUN RRI PALEMBANG STASIUN RRI SUNGAILIAT
407	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN KEUANGAN	3	0	0	0	3	LPP RRI WILAYAH SUMATERA UTARA : STASIUN RRI GUNUNG SITOLI STASIUN RRI MEDAN STASIUN RRI SIBOLGA

Keterangan Jenis Kebutuhan:

U = Umum

C = Putra/Putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude*

D = Penyandang disabilitas

P = Putra/Putri Papua dan Papua Barat

D. KEBUTUHAN PPPK PENEMPATAN KEMENTERIAN KOMINFO

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL KEBUTUHAN	PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	5	DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA, MELIPUTI: - DIREKTORAT EKONOMI DIGITAL - DIREKTORAT PEMBERDAYAAN INFORMATIKA - DIREKTORAT PENGENDALIAN APLIKASI INFORMATIKA - DIREKTORAT TATA KELOLA APLIKASI INFORMATIKA - DIREKTORAT LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN
2	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 MANAJEMEN	2	DIREKTORAT TATA KELOLA APLIKASI INFORMATIKA
3	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 MANAJEMEN - D-IV KEARSIPAN - S-1 AKUNTANSI	1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
4	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 SISTEM KOMPUTER - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	DIREKTORAT LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN
5	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	DIREKTORAT PENGENDALIAN APLIKASI INFORMATIKA
6	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 JURNALISTIK - D-IV MANAJEMEN PRODUKSI PEMBERITAAN - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	DIREKTORAT PENGELOLAAN MEDIA
7	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	MONUMEN PERS NASIONAL
8	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	1	MONUMEN PERS NASIONAL
9	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	2	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
10	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
11	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PUSAT KELEMBAGAAN INTERNASIONAL
12	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	6	PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA

III. JENIS KEBUTUHAN PEGAWAI ASN

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Kebutuhan PNS di Kementerian Kominfo terbagi ke dalam 2 (dua) jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan umum dan kebutuhan khusus dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kebutuhan Umum, dialokasikan bagi setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kebutuhan Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/*Cumlaude*, dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri, dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah sarjana, **tidak termasuk diploma empat**;
 - b. pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan "dengan pujian"/*cumlaude* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - c. pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude*, setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "dengan pujian"/*cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
3. Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas, dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
 - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
4. Kebutuhan Khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat.
Pelamar yang melamar pada kebutuhan khusus putra/putri Papua dan Papua Barat merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua/Papua Barat yang dibuktikan dengan:

- a. akta kelahiran atau surat keterangan lahir; **dan**
- b. surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan hanya bisa melamar di jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh Panitia seleksi yang ditempatkan di Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

IV. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PELAMAR

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
 - b. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar (surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani dari Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku, wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan bebas Narkoba/NAPZA yang masih berlaku dari Rumah Sakit Pemerintah atau Pihak yang berwenang menerbitkan, wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
10. Bersedia mengabdikan pada Kementerian Kominfo/LPP RRI/LPP TVRI dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS (dengan menandatangani surat pernyataan);
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (dengan menandatangani surat pernyataan);
12. Bagi pelamar jabatan yang penempatannya di LPP TVRI dan LPP RRI tidak diperlukan sertifikat TOEFL atau sejenisnya.

Sedangkan bagi pelamar yang penempatannya di Kementerian Kominfo harus memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL atau sejenisnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

TOEFL iBT	Skor minimal 32*
TOEFL ITP/PBT	Skor minimal 400*
TOEFL CBT	Skor minimal 97*
TOEFL Prediction	Skor minimal 400*
IELTS	Skor minimal 4.5*
TOEIC	Skor minimal 345*

**yang masih berlaku pada saat pendaftaran atau maksimal 2 tahun sejak diterbitkan*

13. Pelamar kebutuhan umum dan kebutuhan khusus (kecuali *cumlaude*) merupakan pelamar dengan ketentuan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut (**Surat Keterangan Lulus atau SKL tidak diperkenankan**):

Jenjang Pendidikan	IPK Minimal
D-III, D-IV, S1	2,75 (dua koma tujuh lima).
Magister (S2)	3,20 (tiga koma dua puluh).

14. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum, kebutuhan *cumlaude* atau kebutuhan putra-putri Papua/Papua Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berlaku Nilai Ambang Batas sesuai jenis kebutuhan yang dilamar.
 - b. pelamar dapat melamar pada Jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan Jabatan;
 - c. pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, yang dibuktikan dengan:
 - 1) dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - 2) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

15. Dikarenakan sifat pekerjaan yang khusus dan spesifik yang memerlukan kesiapan dan kemampuan fisik dalam melakukan kegiatan secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan fisik maka pelamar penyandang disabilitas tidak dapat melamar dalam jabatan:
 - a. Ahli Pertama – Pranata Siaran
 - b. Ahli Pertama – Teknisi Siaran
 - c. Terampil – Asisten Pranata Siaran
 - d. Terampil – Asisten Teknisi Siaran

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
 - b. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar (surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani dari Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan bebas Narkoba/NAPZA yang masih berlaku, dari Rumah Sakit Pemerintah atau Pihak yang berwenang menerbitkan wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
10. Wajib memiliki pengalaman kerja di bidang yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar dengan ketentuan:
 - a. Paling singkat 3 tahun bagi jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, ahli pertama;
 - b. Paling singkat 5 tahun bagi jabatan fungsional jenjang mahir, penyelia, ahli muda, dan ahli madya.
11. Pengalaman kerja dimaksud pada angka 10 dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a. Paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah;
 - b. Paling rendah Direktur atau Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*) bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.
12. Memiliki persyaratan tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai (jika ada) yang mengacu pada Keputusan Menteri PANRB

Nomor 981 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Sertifikasi, dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk Melamar pada Jabatan Fungsional dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021;

13. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b) pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, yang dibuktikan dengan:
 - 1) dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - 2) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
14. Masa perjanjian kerja bagi jabatan fungsional PPPK sesuai ketentuan berikut:

No	Jabatan	Penempatan	Masa Perjanjian Kerja
1	Ahli Pertama - Perencana	Direktorat Ekonomi Digital	1 tahun
2	Ahli Pertama - Perencana	Direktorat Pemberdayaan Informatika	1 tahun
3	Ahli Pertama - Perencana	Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika	1 tahun
4	Ahli Pertama - Perencana	Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika	1 tahun
5	Ahli Pertama - Perencana	Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	1 tahun
6	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	1 tahun
7	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika	1 tahun
8	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Sekretariat Inspektorat Jenderal	1 tahun

9	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Pusat Data dan Sarana Informatika	1 tahun
10	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika	1 tahun
11	Ahli Pertama - Arsiparis	Sekretariat Ditjen Aplikasi Informatika	1 tahun
12	Ahli Pertama - Arsiparis	Sekretariat Inspektorat Jenderal	1 tahun
13	Ahli Pertama - Arsiparis	Pusat Kelembagaan Internasional	1 tahun
14	Ahli Pertama - Pranata Humas	Direktorat Pengelolaan Media	1 tahun
15	Ahli Pertama - Pranata Humas	Monumen Pers Nasional	1 tahun
16	Ahli Pertama - Pustakawan	Monumen Pers Nasional	1 tahun

15. Jangka waktu hubungan perjanjian kerja pada tabel nomor 14 di atas **dapat berubah/disesuaikan** dengan mempertimbangkan selisih (tahun) antara usia pelamar yang dinyatakan lulus seleksi akhir dengan batas usia pensiun jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Ketentuan terkait masa perjanjian kerja PPPK mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

V. PERSYARATAN KHUSUS PELAMAR

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

1. Jabatan Analis Konten Media Sosial (**formasi nomor 171**) rencana penempatan di Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika **wajib bersedia** untuk bekerja dengan sistem shift, dimana hari Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya tetap masuk bekerja sesuai shift (Pukul 06.00 s.d 14.00 WIB, 14.00 s.d 22.00 WIB, dan 22.00 s.d 06.00 WIB).
2. Jabatan Analis Sistem Informasi dan Jaringan (**formasi nomor 180**) rencana penempatan di Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika dan jabatan Pengendali Teknologi Informasi (**formasi nomor 182**) rencana penempatan di Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika,

wajib bersedia untuk bekerja dengan sistem shift, dimana hari Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya tetap masuk bekerja sesuai shift (Pukul 06.00 s.d 14.00 WIB, 14.00 s.d 22.00 WIB, dan 22.00 s.d 06.00 WIB) serta **diutamakan** bagi pelamar yang memiliki keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan Linux/ RHCSA/ CCNA yang diperoleh dalam waktu 2 tahun terakhir.

3. Jabatan Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat (**formasi nomor 91**) rencana penempatan di Direktorat Pengelolaan Media, **diutamakan** bagi pelamar yang memiliki kompetensi :
 - a. Kemampuan menggunakan aplikasi editing foto, video, animasi seperti *adobe illustrator, photoshop, after effect, premiere pro*, dan aplikasi lain yang sejenis (dibuktikan pada saat wawancara);
 - b. Memiliki pengalaman kerja di bidang media minimal 2 tahun, dibuktikan dengan surat rekomendasi dari tempat kerja sebelumnya (dibuktikan pada saat wawancara).
4. Jabatan Penyusun Bahan Kebijakan (**formasi nomor 114**) dan Penyusun Norma Standar Prosedur dan Kriteria (**formasi nomor 116**) rencana penempatan di Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, **diutamakan** bagi pelamar yang memiliki kompetensi:
 - a. kemampuan menganalisis isu;
 - b. kemampuan menyusun strategi komunikasi;
 - c. kemampuan melakukan pengumpulan dan pengolahan data;
 - d. memahami metode riset;
 - e. memahami kebijakan di bidang komunikasi publik.
5. Jabatan Analis Kemitraan (**formasi nomor 100**) rencana penempatan di Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, **diutamakan** bagi pelamar yang memiliki kompetensi:
 - a. Kemampuan melakukan pengumpulan dan pengolahan data;
 - b. Kemampuan berkoordinasi dan membangun jejaring, *media relations* ;
 - c. Kemampuan menganalisis isu;
 - d. Kemampuan menyusun strategi komunikasi;
 - e. Sertifikat pelatihan *Public Relations*;
 - f. Menyertakan portofolio pengalaman kerja.
6. Jabatan Analis Informasi (**formasi nomor 94 s.d 99**) rencana penempatan di Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan, serta Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik **diutamakan** bagi pelamar yang memiliki kompetensi:

S-1 Ilmu Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat pelatihan <i>Public Relations</i>; b. Kemampuan dalam menulis <i>Press Release</i> <i>Media Report</i>, <i>Copywriting</i> (konten); c. Kemampuan menganalisis isu; d. Kemampuan menyusun strategi komunikasi; e. Kemampuan dalam mengelola media sosial (terampil menggunakan media sosial, berpengalaman menjadi admin media sosial, dibuktikan dengan <i>capture</i> media sosial tersebut).
S-1 Desain Komunikasi Visual	<ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat pelatihan aplikasi pengolah gambar/grafis; b. Menyertakan portofolio karya yang pernah dibuat.

7. Jabatan Kurator Koleksi Museum (**formasi nomor 111**) rencana penempatan di Monumen Pers Nasional, **diutamakan** bagi pelamar yang memiliki kompetensi:
 - a. Pernah bekerja/terlibat dalam kegiatan pameran museum/galeri seni (surat tugas/surat keterangan/piagam);
 - b. Mempunyai pengetahuan/kemampuan dalam bidang kurasi (sertifikat pelatihan).
8. Jabatan Analis Pengembangan Kompetensi (**formasi nomor 106**) rencana penempatan di Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, **diutamakan** bagi pelamar yang memiliki kompetensi:
 - a. memiliki pengalaman di bidang pengembangan kompetensi SDM;
 - b. memahami kebijakan di bidang komunikasi publik.
9. Jabatan Analis Kinerja (**formasi nomor 102**) rencana penempatan di Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, serta Jabatan Analis Kinerja (**formasi nomor 103**) rencana penempatan di Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik **diutamakan** bagi pelamar yang memiliki kompetensi:
 - a. kemampuan menganalisis kinerja SDM;
 - b. kemampuan menyusun strategi komunikasi;
 - c. kemampuan melakukan pengumpulan dan pengolahan data;
 - d. memahami metode riset;
 - e. memahami kebijakan di bidang komunikasi publik.

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

1. Jabatan Ahli Pertama - Pranata Komputer (**formasi nomor 12**) rencana penempatan di Pusat Data dan Sarana Informatika, **diutamakan** bagi pelamar yang memiliki kompetensi:

- a. menguasai bahasa pemrograman PHP versi 7 ke atas, menguasai DBMS PostgreSQL versi 9 ke atas yang dibuktikan dengan menyertakan link portofolio proyek pengembangan di Github personal masing-masing calon pelamar yang dapat diakses oleh publik/panitia seleksi;
- b. menguasai framework pemrograman PHP Laravel versi 5 ke atas, Yii versi 1 ke atas, Phalcon versi 2 ke atas yang dibuktikan dengan menyertakan link portofolio proyek pengembangan di Github personal masing-masing calon pelamar yang dapat diakses oleh publik/panitia seleksi.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

Setiap pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN (PNS atau PPPK) serta hanya pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan yaitu kebutuhan umum atau kebutuhan khusus (kebutuhan khusus terdiri atas: lulusan terbaik/*cumlaude*, penyandang disabilitas, putra-putri Papua dan Papua Barat).

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

1. Setiap pelamar harus mendaftar melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> untuk mendapatkan *username* dan *password* dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
2. Pelamar mengunggah hasil *scan*/pindai berwarna dokumen dengan format dan ukuran file sesuai ketentuan yang terdapat pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>, dokumen tersebut antara lain:
 - a. Pas foto berwarna dengan ketentuan wajah terlihat jelas, berpakaian formal dengan latar belakang merah.
 - b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) asli atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
 - c. Surat lamaran diketik menggunakan komputer, ditandatangani diatas materai Rp 10.000 dan ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (format surat terdapat pada Lampiran).
 - d. Ijazah asli.
 - e. Transkrip Nilai asli.
 - f. Dokumen pendukung lainnya berupa:
 - 1) Surat Pernyataan diketik menggunakan komputer, ditandatangani diatas materai Rp 10.000 (format surat terdapat pada Lampiran).

- 2) Sertifikat TOEFL/TOEIC/IELTS **khusus bagi pelamar jabatan yang penempatannya di Kementerian Kominfo.**
Sedangkan bagi pelamar jabatan penempatan di TVRI dan RRI tidak diperlukan Sertifikat TOEFL/TOEIC/IELTS.
- 3) Surat Keterangan yang menunjukkan akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) **khusus bagi pelamar yang ijazah/transkrip nilainya tidak mencantumkan keterangan akreditasi.**
- 4) Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah dan Nilai dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi **khusus bagi pelamar lulusan Universitas luar negeri.**
- 5) Surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "dengan pujian"/*cumlaude*, **khusus bagi pelamar yang di ijazah/transkrip nilainya tidak terdapat keterangan predikat kelulusan dengan pujian/ *cumlaude*.**
- 6) Surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan *Cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi **khusus bagi pelamar lulusan Universitas luar negeri yang ingin melamar pada kebutuhan khusus *cumlaude*.**
- 7) Akta kelahiran/surat keterangan lahir **khusus bagi pelamar kebutuhan khusus Putra-Putri Papua/ Papua Barat.**
- 8) Surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku **khusus bagi pelamar kebutuhan khusus Putra-Putri Papua/ Papua Barat.**
- 9) Surat keterangan dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat disabilitas, **khusus bagi pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas.**
- 10) Link atau tautan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar, **khusus bagi pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas.**
- 11) Sertifikat keahlian (**jika ada**) sesuai persyaratan formasi jabatan yang dilamar yang terdapat pada persyaratan khusus pelamar.

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

1. Setiap pelamar harus mendaftar melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> untuk mendapatkan *username* dan *password* dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
2. Pelamar mengunggah hasil *scan*/pindai berwarna dokumen dengan format dan ukuran file sesuai ketentuan yang terdapat pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>, dokumen tersebut antara lain:
 - a. Pas foto berwarna dengan ketentuan wajah terlihat jelas, berpakaian formal dengan latar belakang merah.
 - b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) asli atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
 - c. Surat lamaran diketik menggunakan komputer, ditandatangani diatas materai Rp 10.000 dan ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (format surat terdapat pada Lampiran).
 - d. Ijazah asli.
 - e. Transkrip Nilai asli.
 - f. Dokumen pendukung lainnya berupa:
 - 1) Surat Pernyataan diketik menggunakan komputer, ditandatangani diatas materai Rp 10.000 (format surat terdapat pada Lampiran).
 - 2) Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi **khusus bagi pelamar lulusan Universitas luar negeri.**
 - 3) Surat keterangan dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat disabilitas, **khusus bagi pelamar penyandang disabilitas.**
 - 4) Link atau tautan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar, **khusus bagi pelamar penyandang disabilitas.**
 - 5) Surat Keterangan Pengalaman kerja di bidang yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar yang diterbitkan paling rendah oleh pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah atau Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*) bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.

VII. TAHAPAN SELEKSI

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Tahapan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2021 terdiri atas 3 tahap yang meliputi:

1. Seleksi Administrasi

Panitia akan melakukan seleksi administrasi untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran.

Verifikasi administrasi terhadap persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas atau kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat Jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasan melalui pemeriksaan dokumen dan tautan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar serta persyaratan khusus lain dengan cara berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau tim penguji kesehatan.

Pelamar yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berdasarkan keputusan hasil seleksi administrasi.

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT)

Kelulusan SKD berdasarkan nilai ambang batas (*Passing Grade*) yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) jumlahnya paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar.

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Pelaksanaan SKB akan dilakukan dengan beberapa mekanisme pembobotan antara lain:

- a. Mekanisme pelaksanaan dan pembobotan SKB bagi kebutuhan jabatan penempatan di LPP TVRI, LPP RRI, dan Kementerian Kominfo (kecuali jabatan yang terdapat pada poin b, c dan d dibawah) adalah dengan menggunakan *Computer Assisted Test*

(CAT) yang diselenggarakan oleh BKN dengan bobot 100% dari total nilai SKB.

- b. Mekanisme pelaksanaan dan pembobotan SKB bagi kebutuhan jabatan Analis Penindakan, Analis Forensik Digital dan Analis Konten Media Sosial penempatan di Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Mekanisme dan Aspek Penilaian	Bobot Penilaian	Bersifat Menggugurkan
1	SKB CAT	50% dari total SKB	Tidak
2	SKB Wawancara: - pemahaman UU ITE (bagi jabatan analis penindakan) - pemahaman dasar forensik digital (bagi jabatan analis forensik digital) - pemahaman tentang pengendalian konten internet bermuatan negatif (bagi jabatan analis konten media sosial)	25% dari total SKB	Tidak
3	SKB Praktek Kerja: - Keterampilan mengetik (bagi semua jabatan) - Studi kasus tentang tindak pidana ITE (bagi jabatan analis penindakan) - Studi kasus tentang uji forensik digital sederhana (bagi jabatan analis forensik digital) - Studi kasus tentang Konten Internet (bagi jabatan analis konten media sosial)	25% dari total SKB	Tidak

- c. Mekanisme pelaksanaan dan pembobotan SKB bagi kebutuhan **jabatan penempatan di:**
- Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik;
 - Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik;
 - Direktorat Pengelolaan Media;

- Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan;
- Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim;
- Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Monumen Pers Nasional;
- Museum Penerangan.

akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Mekanisme dan Aspek Penilaian	Bobot Penilaian	Bersifat Menggugurkan
1	SKB CAT	70% dari total SKB	Tidak
2	SKB Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Knowledge</i> - <i>Skill</i> - <i>Attitude</i> - Portofolio 	30% dari total SKB	Tidak

- d. Mekanisme pelaksanaan dan pembobotan SKB bagi kebutuhan jabatan Asisten Ahli – Dosen penempatan di Sekolah Tinggi Multi Media, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Mekanisme dan Aspek Penilaian	Bobot Penilaian	Bersifat Menggugurkan
1	SKB CAT	50% dari total SKB	Tidak
2	SKB Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> - Pedagogik - Kepribadian - Sosial - Profesional 	25% dari total SKB	Tidak
3	SKB Praktek Kerja: <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Pembelajaran - Pembuatan Bahan Ajar - Demonstrasi Mengajar/<i>microteaching</i> 	25% dari total SKB	Tidak

- e. Mekanisme pelaksanaan dan pembobotan SKB bagi kebutuhan jabatan Ahli Pertama - Pranata Komputer, Analis Data dan Informasi, Analis Sistem Informasi, Pengendali Jaringan Komunikasi dan Pengendali Teknologi Informasi penempatan di Pusat Data dan Sarana Informatika, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Mekanisme dan Aspek Penilaian	Bobot Penilaian	Bersifat Menggugurkan
1	SKB CAT	50% dari total SKB	Tidak
2	SKB Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> - Pemrograman - Pengelolaan jaringan - Pengelolaan data center - Keamanan informatika - Pengelolaan data 	25% dari total SKB	Tidak
3	SKB Praktek Kerja: <ul style="list-style-type: none"> a. Ahli Pertama - Pranata Komputer <ul style="list-style-type: none"> - Administrasi sistem operasi - TCP/IP - Dasar pemrograman Python - Analisis dan perancangan sistem informasi - Perancangan basis data b. Analis Sistem Informasi <ul style="list-style-type: none"> - Analisis dan perancangan sistem informasi - Pemrograman dengan manipulasi array - Pemrograman berbasis obyek - Pemrograman dengan membuat struktur data linked list sederhana - Pemrograman dengan problem set fizz buzz c. Analis Data dan Informasi <ul style="list-style-type: none"> - SQL query - Penguasaan Microsoft Excel - Pemrograman dasar Python - Visualisasi data - Problem set statistika dasar d. Pengendali jaringan komunikasi <ul style="list-style-type: none"> - TCP/IP - Administrasi sistem operasi - Simulasi perancangan dan konfigurasi jaringan - Troubleshooting jaringan e. Pengendali teknologi informasi <ul style="list-style-type: none"> - TCP/IP - Administrasi sistem operasi - Instalasi sistem operasi - Virtualisasi sistem operasi 	25% dari total SKB	Tidak

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Tahapan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk jabatan fungsional penempatan di Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri atas beberapa tahap yang meliputi:

1) Seleksi Administrasi

Panitia akan melakukan seleksi administrasi untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran.

Verifikasi administrasi terhadap pelamar penyandang disabilitas dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat Jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitan melalui pemeriksaan dokumen dan tautan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar serta persyaratan khusus lain dengan cara berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau tim penguji kesehatan.

Pelamar yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berdasarkan keputusan hasil seleksi administrasi.

2) Seleksi Kompetensi

Seleksi kompetensi terdiri atas:

1. Kompetensi Teknis;
2. Kompetensi Manajerial; dan
3. Kompetensi Sosial Kultural.

Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi jika memenuhi Nilai Ambang Batas yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri PANRB yang terdiri atas:

1. Nilai Ambang Batas Kompetensi Teknis;
2. Nilai Ambang Batas kumulatif Kompetensi Manajerial dan sosial kultural;

3) Wawancara menggunakan CAT oleh BKN

Merupakan tahapan untuk menilai integritas dan moralitas. Pelamar dinyatakan lulus jika memenuhi nilai ambang batas wawancara yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri PANRB.

VIII. TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan SKD CAT dan SKB CAT Seleksi CPNS serta Seleksi Kompetensi PPPK di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A 2021 akan diselenggarakan di lokasi sebagai berikut :

1. BKN Pusat
2. Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta
3. Kantor Regional 2 BKN Surabaya
4. Kantor Regional 3 BKN Bandung
5. Kantor Regional 4 BKN Makassar
6. Kantor Regional 6 BKN Medan
7. Kantor Regional 7 BKN Palembang
8. Kantor Regional 8 BKN Banjarmasin
9. Kantor Regional 9 BKN Jayapura
10. Kantor Regional 10 BKN Denpasar
11. Kantor Regional 11 BKN Manado
12. Kantor Regional 12 BKN Pekanbaru
13. Kantor Regional 13 BKN Aceh
14. Kantor Regional 14 BKN Manokwari
15. UPT BKN Ambon
16. UPT BKN Balikpapan
17. UPT BKN Batam
18. UPT BKN Bengkulu
19. UPT BKN Gorontalo
20. UPT BKN Jambi
21. UPT BKN Kendari
22. UPT BKN Lampung
23. UPT BKN Mamuju
24. UPT BKN Mataram
25. UPT BKN Padang
26. UPT BKN Palangkaraya
27. UPT BKN Palu
28. UPT BKN Pangkal Pinang
29. UPT BKN Pontianak
30. UPT BKN Semarang
31. UPT BKN Sorong
32. UPT BKN Tarakan
33. UPT BKN Ternate

Sedangkan Penentuan mekanisme, lokasi dan waktu pelaksanaan SKB tambahan untuk seleksi CPNS akan dilakukan dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebijakan pemerintah terkait pandemi covid-19 dan akan diinformasikan kemudian.

IX. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dan PPPK Nonguru Formasi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni s.d. 14 Juli 2021
2.	Pendaftaran Seleksi ASN	30 Juni s.d. 21 Juli 2021
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d. 29 Juli 2021
4.	Masa Sanggah	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021
5.	Jawab Sanggah	30 Juli s.d. 8 Agustus 2021
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7.	Pelaksanaan SKD	25 Agustus s.d. 4 Oktober 2021
8.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Nonguru	Setelah pelaksanaan SKD selesai di masing-masing titik
9.	Pengumuman Hasil SKD	17 s.d. 18 Oktober 2021
10.	Persiapan Pelaksanaan SKB	19 Oktober s.d 1 November 2021
11.	Pelaksanaan SKB	8 s.d. 29 November 2021
12.	Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB serta Seleksi PPPK Nonguru	15 s.d. 17 Desember 2021
13.	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2021
14.	Masa Sanggah	20 s.d. 22 Desember 2021
15.	Jawab Sanggah	20 s.d. 29 Desember 2021
16.	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s.d. 31 Desember 2021
17.	Pengisian DRH	1 s.d. 18 Januari 2022
18.	Usul Penetapan NIP/NI PPPK	19 Januari s.d. 18 Februari 2022

X. LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dan seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun.
2. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan gugur.
3. Bagi pelamar yang sebelumnya pernah mengajukan lamaran ke Kementerian Komunikasi dan Informatika, sepanjang memenuhi persyaratan dalam pengumuman ini, wajib mengajukan kembali lamarannya sesuai tata cara yang tercantum dalam pengumuman ini.
4. Pengumuman setiap tahapan tes ditayangkan melalui website resmi Kementerian Kominfo <https://kominfo.go.id> atau <https://sscasn.bkn.go.id>.
5. Pelamar harus membaca dengan cermat setiap pengumuman dan tahapan seleksi. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami setiap pengumuman dan tahapan adalah merupakan tanggungjawab pelamar.

6. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta.
7. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi CPNS di Kementerian Kominfo dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut. Pelamar dapat melaporkan hal tersebut ke email: kontakcpns@kominfo.go.id.
8. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS, Kementerian Kominfo berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai CPNS, dan melaporkan hal tersebut sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib, karena telah memberikan keterangan palsu.
9. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk periode berikutnya.
10. Pelayanan informasi berkaitan dengan proses pendaftaran Seleksi CPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2021 dapat dihubungi melalui:
 - a) Telp : 0812 930 423 90
pada hari Senin s/d Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB
 - b) Group Telegram : <https://kominfo/CPNS2021>
 - c) Twitter : @kemkominfo
14. Keputusan akhir Panitia Seleksi dalam hal kelulusan pelamar bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 30 Juni 2021

Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia Seleksi,

LAMPIRAN 1

SURAT LAMARAN

Kepada Yth.
Menteri Komunikasi dan Informatika RI
di Jakarta

....., ... Juli 2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan/Universitas :
Alamat Domisili :

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2021 Sebagai bahan pertimbangan, berikut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Unggah hasil pindai pas foto berwarna dengan ketentuan wajah terlihat jelas, berpakaian formal dengan latar belakang merah.
2. Unggah hasil pindai E-KTP asli atau Surat Keterangan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
3. Unggah hasil pindai surat lamaran
4. Unggah hasil pindai surat pernyataan
5. Unggah hasil pindai Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli
6. Unggah hasil pindai Sertifikat TOEFL/TOEIC/IELTS Asli
7. Unggah hasil pindai surat keterangan yang menunjukkan akreditasi program studi
8. Unggah hasil pindai surat keterangan penyetaraan ijazah dan surat keterangan penyetaraan nilai
9. Unggah hasil pindai surat keterangan status kelulusan *cumlaude*/dengan pujian
10. Unggah hasil pindai akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir
11. Unggah hasil pindai surat keterangan jenis dan derajat disabilitas dari dokter RS Pemerintah/ Puskesmas
12. Unggah hasil pindai Sertifikat keahlian (sesuai persyaratan khusus, jika ada)

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya sampaikan adalah benar. Apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia seleksi ASN Kementerian Kominfo untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi CPNS Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2021.

Demikian surat lamaran ini saya buat. Atas perhatian Bapak Menteri diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Materai 10.000 & ttd

Nama Pelamar

***Catatan:**

Pilih daftar dokumen yang dilampirkan, sesuai ketentuan jabatan yang dilamar

LAMPIRAN 2

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan/Universitas :
Alamat Domisili :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. (surat keterangan/ catatan kepolisian wajib dilengkapi setelah dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir sebagai CPNS).
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, anggota TNI/POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis.
5. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (surat keterangan wajib dilengkapi setelah dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir sebagai CPNS).
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar.
8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Bersedia mengabdikan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, LPP TVRI dan LPP RRI dengan tidak mengajukan pindah antar instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS.
10. Bersedia bekerja dengan sistem shift, dimana hari Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya tetap masuk bekerja sesuai shift (jika diperlukan/sesuai jabatan yang dilamar)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia

seleksi ASN Kementerian Kominfo untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi CPNS Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2021.

Atas perhatian Bapak Menteri diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

materai Rp. 10.000 & ttd

Nama Pelamar

LAMPIRAN 3

SURAT PERNYATAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan/Universitas :
Alamat Domisili :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
4. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
6. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar.
7. Bersedia ditempatkan diseluruh diseluruh unit kerja/ satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia seleksi PPPK Kementerian Kominfo untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi PPPK Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2021.

Atas perhatian Bapak Menteri diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

materai Rp. 10.000 & ttd

Nama Pelamar